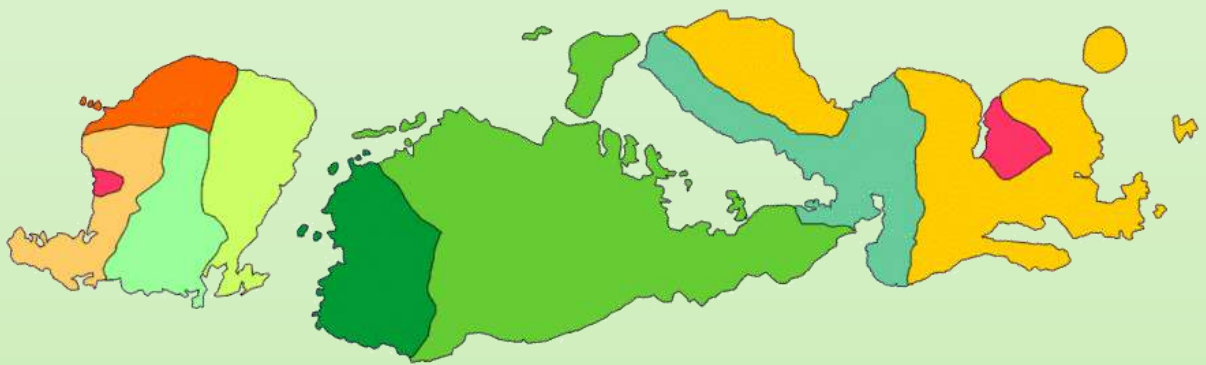


RENCANA KERJA DINAS ESDM PROVINSI NTB TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Majapahit No. 40 Mataram Telepon (0370) 621356 Faximile (0370) 625766



Dinas ESDM Provinsi NTB



@DESDMNTB



@desdmntb



desdm@ntbprov.go.id



www.desdm.ntbprov.go.id



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Tahun 2024 juga disusun dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dengan tema “Peningkatan produktivitas daerah untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui sumber daya manusia dan lingkungan berkualitas”.

Pembangunan daerah Provinsi NTB tahun 2024 dijabarkan dalam tiga pilar utama diantaranya meningkatnya kualitas manusia NTB yang kompetitif, unggul, andal, dan takwa; meningkatnya kualitas lingkungan NTB yang LESTARI dan ASRI, meningkatnya kesejahteraan masyarakat NTB yang semakin MANDIRI. Rencana Kerja Tahun 2024 ini disusun berdasarkan analisis data eksisting, capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, usulan program/kegiatan dari masyarakat, dan sinkronisasi terhadap dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing program/kegiatan.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024 ini. Harapannya dokumen ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi NTB dalam rangka mencapai tujuan “Peningkatan Produktivitas Daerah Untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi Melalui Sumber Daya Manusia dan Lingkungan yang Berkualitas”.

Mataram, Desember 2024

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



H. SAHDAN, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 198503 1 140



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI ..	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2023	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	40
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	42
3.3. Program dan Kegiatan	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	58
BAB V PENUTUP	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan antara Dokumen Rencana Kerja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.	1
Gambar 2.1. Belanja Tahun 2019-2022	4
Gambar 2.2. Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2019-2022	5
Gambar 2.3. Belanja dan Realisasi Tahun 2019–2022	5
Gambar 2.4. Perbandingan Capaian RE Nasional dengan Provinsi NTB Tahun 2019-2022	10
Gambar 2.5. Target dan Realisasi Jumlah Masyarakat yang Terlayani Air Bersih	10
Gambar 2.6. Perkembangan Kondisi Kelistrikan NTB Tahun 2019-2022	15
Gambar 3.1. Peta Strategis Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024	41



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Daftar Personil Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2022	4
Tabel 2.2.	Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Pendukung Tahun 2022.....	6
Tabel 2.3.	Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022	6
Tabel 2.4.	Capaian Rasio Elektrifikasi Tahun 2019-2022	9
Tabel 2.5.	Capaian Cakupan Air Bersih dan Masyarakat yang Terlayani Air Bersih Tahun 2019-2022	10
Tabel 2.6.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas ESDM Provinsin NTB dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022	11
Tabel 2.7.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyeenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang ESDM Provinsi NTB	14
Tabel 2.8.	Sebaran Rumah Tangga Yang memperoleh Sambungan Listrik dari Tetangga	15
Tabel 2.9.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTB	16
Tabel 2.10.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang ESDM.....	19
Tabel 2.11.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2021 Provinsi NTB	25
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2023	42
Tabel 3.2.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021.....	45



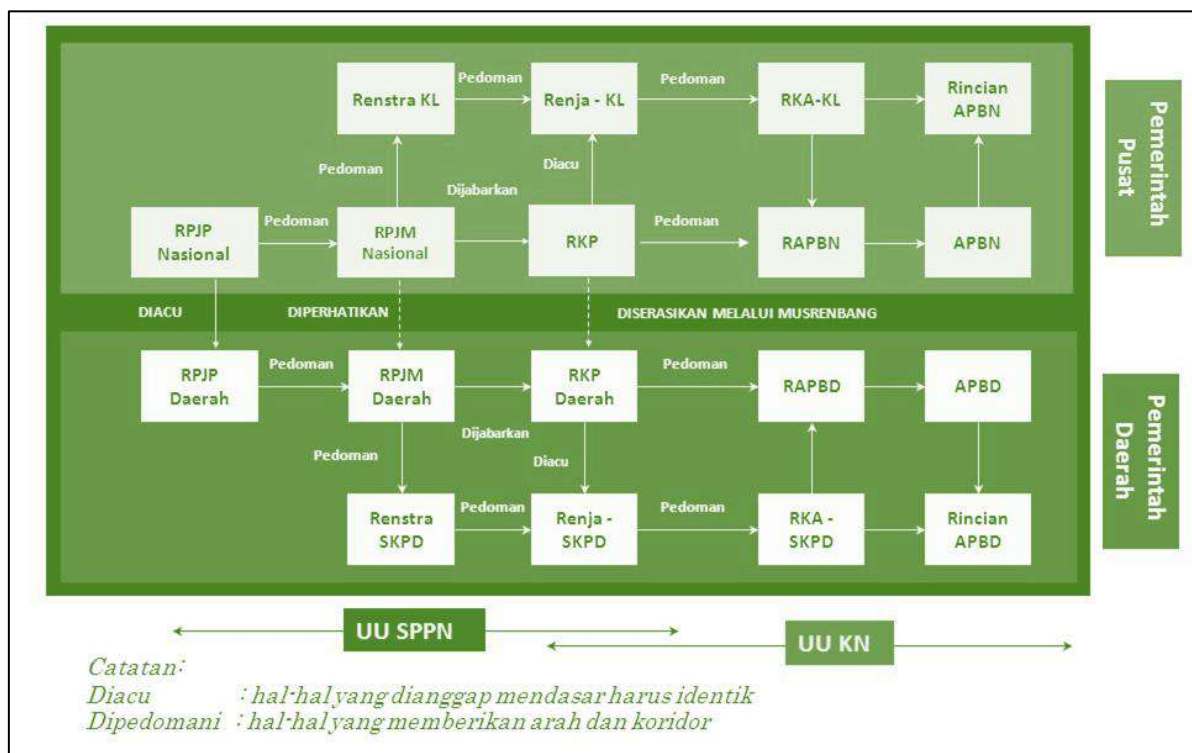
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang disusun dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan tema Peningkatan produktivitas daerah untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui sumber daya manusia dan lingkungan berkualitas”. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan analisis data eksisting, capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, usulan program/kegiatan dari masyarakat, dan sinkronisasi terhadap dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Tahun Anggaran 2024.

Adapun hubungan antara dokumen Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya pada level Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dapat dijelaskan pada diagram di bawah ini :



Gambar 1.1 Hubungan antara Dokumen Rencana Kerja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024 diantaranya adalah:

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pegelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 2);



16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 171);
18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024 ini adalah:

1. Untuk memperoleh gambaran keterkaitan dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan tahun 2022, terhadap pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023 yang sedang berjalan, dan rencana program/kegiatan tahun 2024;
2. Untuk menentukan program/kegiatan untuk tahun 2024 yang tepat berdasarkan skala prioritas sesuai dengan tema Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah “Peningkatan produktivitas daerah untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui sumber daya manusia dan lingkungan berkualitas”;
3. Sebagai pedoman bagi Dinas dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024;

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024 ini adalah agar target pembangunan dalam urusan pemerintahan bidang ESDM tahun 2024 dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 maupun Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB merupakan perangkat daerah yang terdiri atas kantor induk yang terletak di Kota Mataram dan kantor cabang dinas yang berada di Kabupaten Sumbawa. Tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi dilaksanakan oleh jajaran aparatur dengan pendidikan terendah SLTP dan tertinggi pasca sarjana (S2). Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, personil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB sebanyak 72 Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari 15 orang golongan IV, 36 orang golongan III, dan 21 orang golongan II. Berdasarkan pendidikan, terdapat 11 orang pasca sarjana (S2), 33 orang sarjana/setingkat sarjana (S1)/D4, 23 orang berpendidikan SLTA dan 3 orang berpendidikan SLTP, sebagaimana tabel berikut:

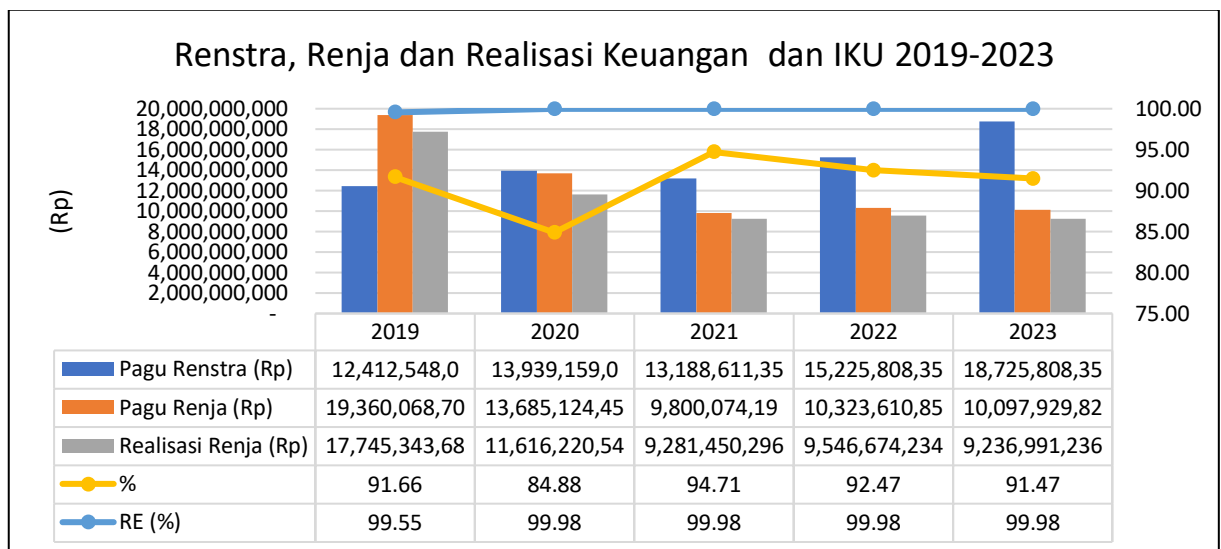
Tabel 2.1. Daftar Personil Dinas ESDM Provinsi NTB per 31 Desember 2023

URAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN					JUMLAH	PANGKAT/ GOLONGAN			JUMLAH
	S2	S1	DIII	SLTA	SLTP		IV	III	II	
Eselon II	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1
Eselon III	3	3	-	-	-	6	6	-	-	6
Eselon IV	0	5	-	-	-	5	0	5	-	5
JFT	6	9	-	-	-	16	7	9	-	16
JFU	1	16	1	23	3	44	1	22	21	44
JUMLAH	11	33	1	23	3	72	15	36	21	72

Sarana dan prasara penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2022 memiliki asset yang terdiri dari tanah seluas 6.258 m² yang didalamnya terdapat Gedung Kantor, perpustakaan, tempat ibadah, tempat olahraga, gudang, garasi, bengkel, laboratorium dan pos jaga. Sebagai penunjang kerja terdapat peralatan dan mesin yang terdiri dari kendaraan, alat-alat kantor, alat rumah tangga, alat komputer, meja dan kursi kerja, alat komunikasi, alat studio dan alat peraga dalam jumlah yang mencukupi. Selama lima belas tahun terakhir Dinas ESDM Provinsi NTB juga melaksanakan pembangunan dalam bentuk hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat atau badan hukum yang masuk dalam kategori jalan, irigasi dan jaringan berupa pembangunan digester biogas, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tersebar atau *Solar Home System* (SHS) dan PLTS Komunal, pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), penerangan jalan umum PJU-LED, sumur bor dalam dan pemasangan jaringan listrik bagi rumah tangga miskin.

Pembiayaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruhnya berasal dari APBD Provinsi NTB dimana alokasi anggaran untuk sektor ESDM semakin menurun antara kurun waktu 2019-2023, dari Rp. 19.360.068.700, - pada tahun 2019 menjadi Rp. 10.097.929.824,- pada tahun 2023.

Dalam kurun waktu tahun 2019-2023 realisasi belanja berkisar antara 91,66% sampai 91,47% dengan rata-rata realisasi belanja sebesar 99,65%. Untuk tahun 2023 Penurunan belanja juga berpengaruh terhadap komposisi Belanja untuk Operasional terhadap belanja pegawai yang semakin menurun. Komposisi belanja Operasional semakin berkurang dan belanja semakin besar.



Gambar 2.1 Anggaran Renstra , Renja dan Realisasi Keuangan 2019-2023



Gambar 2.2 Komposisi Belanja Operasional dengan Belanja Pegawai 2019-2023

Berdasarkan target kinerja pelayanan Dinas ESDM dapat digambarkan dalam tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Dinas ESDM periode tahun 2019-2023. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, Indikator Kinerja Utama Dinas ESDM adalah Rasio Elektrifikasi. Rasio Elektrifikasi diformulasikan sebagai perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil meningkatkan Rasio Elektrifikasi sebesar 6,15% dari 93,83,43% pada tahun 2018 meningkat menjadi 99,98% pada tahun 2022 atau tahun keempat masa RPJMD Tahun 2019-2023. Selama lima tahun terakhir, capaian



terendah diperoleh pada tahun 2022 dengan capaian realisasi terhadap target sebesar 100,10% dan capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2018 sebesar 125,11%. Meningkatnya capaian realisasi Rasio Elektrifikasi terhadap target diperoleh dari semakin handalnya sistem kelistrikan Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode tahun 2014-2022.

Sejak tahun 2014 Pemerintah telah menetapkan pembangunan pembangkit listrik 35.000MW di seluruh Indonesia. Untuk Provinsi NTB direncanakan akan dibangun beberapa pembangkit listrik yang diharapkan akan menambah daya sebesar 500 MW sampai dengan akhir tahun 2023 baik melalui PLN maupun melalui *Independent Power Producer* (IPP). Pembangunan pembangkit juga akan disertai dengan penambahan kapasitas jaringan listrik untuk meningkatkan keandalan listrik hingga sampai ke rumah-rumah masyarakat pengguna listrik.

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Rasio Elektrifikasi 2014 – 2022

No	Rasio Elektrifikasi	Satuan	Tahun								
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Target	%	65,58	68,01	70,43	72,67	75,00	94,46	95,09	99,77	99,88
2	Realisasi	%	66,91	72,67	77,89	85,10	93,83	99,55	99,98	99,98	99,98
3	Capaian	%	102,03	106,85	110,59	117,10	125,11	105,39	105,14	100,21	100,10

Sumber : Diolah dari Data PLN NTB dan Dinas ESDM Provinsi NTB

Capaian target rasio elektrifikasi ditopang adanya faktor ketersediaan daya listrik yang semakin meningkat sejak tahun 2015. Peran Dinas ESDM terhadap capaian indikator rasio elektrifikasi tersebut terkait dengan koordinasi yang baik antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, PLN Wilayah NTB dan seluruh *stakeholder* terkait sesuai dengan fungsinya masing-masing. Peningkatan rasio elektrifikasi juga dilaksanakan melalui program . Program pemasangan listrik murah dan hemat merupakan program Kementerian ESDM sejak tahun 2012 hingga tahun 2015, kemudian Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas ESDM melaksanakannya sejak tahun 2014 hingga saat ini, jumlah pemasangan listrik murah dan hemat hingga tahun 2022 telah dinikmati oleh 31.853 Rumah Tangga. Program tersebut berfokus terhadap masyarakat miskin yang rumahnya sudah dilalui jaringan listrik namun tidak mampu untuk memasang listrik secara mandiri.

Tabel 2.3 Rekapitulasi Belanja Operasional melalui APBD Anggaran 2022 yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi NTB

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			9,940,041,459	9,186,795,156	92.42	99.77
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	78,90	9,363,467,920	8,620,995,969	92.07	100.00
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	270,399,240	216,378,297	80.02	100.00
3.29.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	99,279,300	88,676,406	89.32	100.00
3.29.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan	1	18,233,500	2,280,000	12.50	100.00
3.29.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Laporan	1	14,572,300	13,275,500	91.10	100.00
3.29.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Laporan	1	17,702,700	2,154,000	12.17	100.00
3.29.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Laporan	1	15,172,940	6,966,700	45.92	100.00



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
3.29.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	1	2,842,100	1,556,400	55.06	100.00
3.29.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	102,593,400	101,459,291	98.89	100.00
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	8,257,046,200	7,638,359,128	92.51	100.00
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	73	8,187,556,120	7,589,964,888	92.70	100.00
3.29.01.1.02.02	Peyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	24,660,000	21,940,000	88.97	100.00
3.29.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	1	3,412,500	3,039,500	89.07	100.00
3.29.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan	1	18,293,140	9,040,600	49.42	100.00
3.29.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	13,068,640	11,441,940	87.55	100.00
3.29.01.1.02.06	Pengelolaan dan Persiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan	1	1,283,300	0	0	0
3.29.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keunagan Bulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	3,297,500	2,932,200	88.92	100.00
3.29.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	5,475,000	0	0	0
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Laporan	1	23,253,400	23,223,400	99.87	100.00
3.29.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	11,537,000	11,507,000	99.74	100.00
3.29.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	2,887,000	2,887,000	100.00	100.00
3.29.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	3,213,000	3,213,000	100.00	100.00
3.29.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1	3,567,400	3,565,400	100.00	100.00
3.29.01.1.03.07P	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	2,051,000	2,051,000	100.00	100.00
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	8,695,400	8,594,900	98.84	100.00
3.29.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Laporan	1	4,108,700	4,053,000	98.64	100.00
3.29.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	1	3,837,900	3,837,900	95.78	100.00
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	1	748,800	704,000	94.02	100.00
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	1	234,457,480	233,693,322	99.67	100.00
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	11	4,120,000	4,108,000	99.71	100.00
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	37	21,515,700	21,429,500	99.60	100.00
3.29.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis	10	11,613,800	11,575,500	99.67	100.00
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	7	9,299,300	8,862,000	95.30	100.00
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jenis	16	6,945,880	6,933,680	99.82	100.00
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Orang	581	10,750,000	10,750,000	100.00	100.00
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1	170,212,800	170,034,642	99.98	100.00
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	7	2,795,000	0	0	0
3.29.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	7	2,795,000	0	0	0
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun	1	416,551,200	350,792,660	84.21	100.00
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat	2596	1,347,200	2,705,000	99.96	100.00
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	3	143,400,000	90,037,960	62.79	100.00



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rekening	3	271,804,000	259,407,500	95.44	100.00
3.29. 01. 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun	1	150,270,000	149,954,262	99.79	100.00
3.29.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	7	47,860,000	47,856,741	99.99	100.00
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	6	99,200,000	98,887,521	99.69	100.00
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	9	3,210,000	3,210,000	100.00	100.00
Sasaran Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah							
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	%	100	122,729,200	118,269,200	96.37	100.00
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Laporan	3	66,077,600	65,517,600	99.15	100.00
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dokumen	3	35,452,000	35,452,000	100.00	100.00
3.29.02.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dokumen	3	15,520,000	15,120,000	99.42	100.00
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dokumen	3	15,105,000	14,945,600	98.94	100.00
3.29.02.1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, Dan Izin Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Laporan	10	27,247,600	26,287,600	96.48	100.00
3.29.02.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Rekomendasi	164	14,868,000	14,188,000	95.43	100.00
3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Izin	15	12,379,600	12,099,600	97.74	100.00
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Provinsi	Laporan	3	29,404,000	26,464,000	90.00	100.00
3.29.02.1.03.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi	Laporan	3	9,520,000	9,160,000	96.22	100.00
3.29.02.1.03.02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Laporan	3	9,260,000	6,680,000	72.14	100.00
3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Laporan	3	10,624,000	10,624,000	100.00	100.00
Sasaran Meningkatnya Pengendalian Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara							
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Wilayah Izin Pertambangan	46	81,938,900	81,557,900	99.56	100,00
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Atau Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	20	29,493,300	29,485,300	99.97	100,00
3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah	Rekomendasi	-	17,050,700	17,050,700	100.00	100.00



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
	Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Izin	20	12,442,600	12,434,000	99.94	100.00
3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Izin	5	37,631,400	37,298,400	99.12	100.00
3.29.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Dokumen	5	22,953,200	22,920,000	99.86	100.00
3.29.03.1.04.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Izin	5	14,678,200	14,378,200	97.96	100.00
3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan	Data	21	14,814,200	14,794,200	99.86	100.00
3.29.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Izin	21	14,814,200	14,794,200	99.86	100.00
Sasaran Meningkatkan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan							
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)	6.7	97,812,704	95,060,812	97.19	100.00
3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, Dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Izin	2	21,016,404	20,742,892	98.70	100.00
3.29.05.1.03.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Rekomendasi	1	14,196,404	14,002,892	98.64	100.00
3.29.05.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Izin	2	6,820,000	6,740,000	98.83	100.00
3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Unit	-	76,796,300	74,317,920	96.77	100.00
3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Dokumen	1	22,697,600	22,572,600	99.47	100.00
3.29.05.1.04.03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Orang	20	32,319,100	30,281,020	93.69	100.00
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Unit	-	21,779,600	21,459,300	98.53	100.00
Sasaran Meningkatkan Cakupan Layanan Listrik Bagi Masyarakat							



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (Rumah Tangga)	700	274,092,735	270,891,275	98.83	100.00
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi	Instalasi Tenaga Listrik	5	35,727,500	34,027,500	95.24	100.00
3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas dalam Daerah Provinsi	Izin	5	15,010,000	13,310,000	88.67	100.00
3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Izin	5	20,717,500	20,717,500	100.00	100.00
3.29.06.1.06	Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Sarana	700	238,365,235	236,863,775	99.37	100.00
3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Sarana	700	238,365,235	236,863,775	99.37	100.00
	Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa			383,569,400	359,879,078	93.82	100.00
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			317,790,400	295,878,078	93.10	100.00
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	1	37,286,630	36,344,000	97.47	100.00
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	8	2,224,400	1,646,000	74.00	100.00
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	2	2,678,000	2,656,000	99.18	100.00
3.29.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Orang	48	1,392,000	1,368,000	98.28	100.00
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1	30,992,230	30,674,413	98.97	100.00
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun	1	261,393,770	241,006,532	92.20	100.00
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat	78	3,480,000	480,000	100.00	100.00
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis	4	26,749,770	19,359,532	72.37	100.00
3.29.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	1	1,176,000	1,090,000	92.69	100.00
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	5	229,988,000	220,467,000	95.86	100.00
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun	1	19,110,000	18,527,546	96.95	100.00
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	2	19,110,000	18,527,546	96.95	100.00
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGELOLOGIAN	%	100	20,370,000	19,397,250	95.22	100.00
3.29.02.1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Laporan	1	20,370,000	19,397,250	95.22	100.00
3.29.02.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah	Izin	5	12,935,000	12,103,250	93.57	100.00
3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Izin	5	7,435,000	7,294,000	98.10	100.00



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Wilayah Izin Pertambangan	3	19,318,000	19,146,500	99.11	100.00
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Atau Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	3	19,318,000	19,146,500	99.11	100.00
3.29.03.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WRP dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Izin	3	9,383,400	9,292,500	99.03	100.00
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Izin	3	9,935,000	9,854,000	99.03	100.00
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)	6.7	8,821,400	8,523,250	96.62	100.00
3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Izin	-	8,821,400	8,523,250	96.62	100.00
3.29.05.1.03.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Izin	-	4,232,600	4,184,500	98.86	100.00
3.29.05.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Izin	-	4,588,800	4,338,750	94.95	100.00
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (Rumah Tangga)	-	17,269,200	16,934,000	98.06	100.00
3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi	Pertimbangan Teknis	-	17,269,200	16,934,000	98.06	100.00
3.29.06.1.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Listrik Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi	Izin	1	7,907,600	7,572,500	95.76	100.00
3.29.06.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi	Izin	1	9,361,600	9,361,500	100.00	100.00



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
	yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi						
Rata-Rata Realisasi Keuangan						92,47	
Rata-Rata Realisasi Fisik							99,78
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEUANGAN						92,47	

Dinas ESDM Provinsi NTB selaku perangkat daerah mempunyai tanggungjawab terhadap peningkatan Indikator Kinerja Kunci Rasio Elektrifikasi sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Rasio Elektrifikasi merupakan jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan akses listrik terhadap jumlah seluruh rumah tangga yang ada. Berikut capaian rasio elektrifikasi tahun 2014-2022 secara nasional dan daerah:

Tabel 2.4 Capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2014-2022

Sejak tahun 2018 Rasio Desa Berlistrik Provinsi NTB sudah mencapai 100%, namun demikian belum seluruh desa terjangkau oleh jaringan listrik PLN terutama di Kabupaten Sumbawa masih terdapat 5 desa yang mendapatkan listrik dari sumber non PLN menggunakan pembangkit energi baru terbarukan. Berdasarkan data tahun 2022 masih terdapat 34 Dusun yang belum dilalui oleh jaringan listrik PLN yang berada pada wilayah pegunungan dan pulau-pulau kecil berpenduduk. Kendala utama belum masuknya jaringan listrik PLN pada 34 Dusun tersebut dikarenakan infrastruktur jalan Kabupaten yang tidak dapat mendukung bagi kegiatan pembangunan jaringan listrik PLN, untuk itu diperlukan *cros cutting* program dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan PLN sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Rasio Elektrifikasi (%)	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Target RPJMN	76,80	80,00	87,35	90,15	92,75	95,15	97,00
Realisasi Nasional	80,51	84,35	88,30	91,20	95,40	97,50	98,89
Deviasi	3,71	4,35	0,95	1,05	2,65	2,35	1,89
Target RPJMD	62,02	65,58	68,01	70,34	72,67	75,00	94,46
Realisasi Provinsi NTB	64,43	66,91	72,67	77,89	85,10	93,83	99,55
Deviasi	2,41	1,33	4,66	7,55	12,43	18,83	5,09

Keterangan: *Realisasi Nasional akhir tahun 2019, Realisasi Provinsi NTB akhir tahun 2019

Tabel 2.4 Hubungan Alokasi Anggaran terhadap Capaian Rasio Elektrifikasi

Capaian Rasio Elektrifikasi banyak dipengaruhi oleh kondisi eksternal Dinas. Intervensi langsung Pemerintah Provinsi melalui APBD sangat kecil pengaruhnya terhadap peningkatan Rasio Elektrifikasi jika dibandingkan dengan intervensi Pemerintah Pusat melalui PLN. Peran Pemerintah Provinsi terhadap peningkatan Rasio Elektrifikasi lebih bersifat koordinasi dan fasilitasi terhadap Pemerintah Pusat, BUMN dan swadaya masyarakat. Pemerintah Pusat telah berkomitmen meningkatkan kedaulatan energi melalui pembangunan pembangkit 35.000 MW



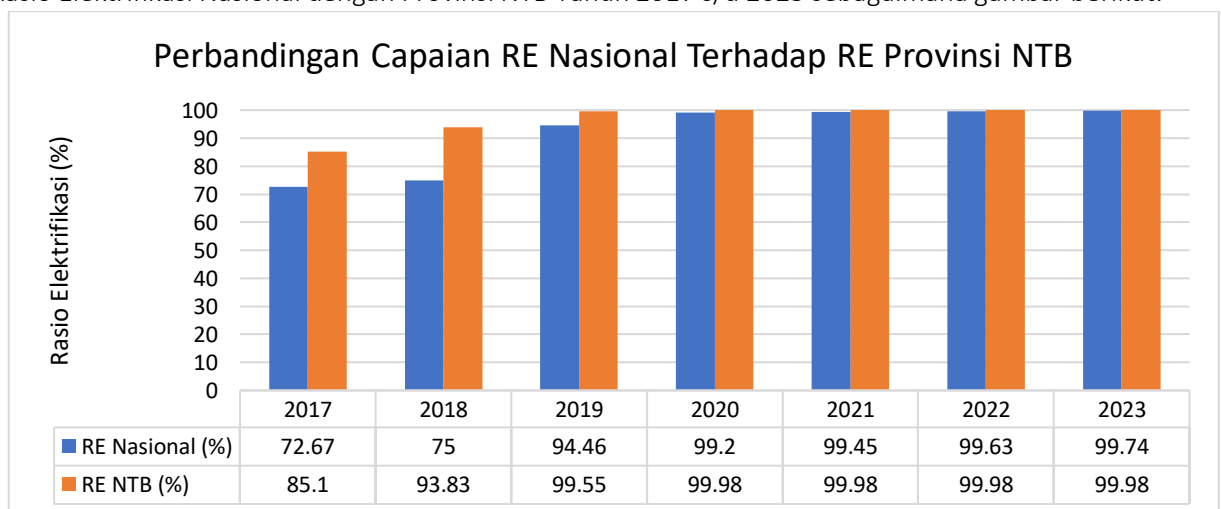
dan perluasan jaringan listrik yang dilaksanakan oleh PLN dimana Provinsi NTB mendapat tambahan 500 MW sampai dengantahun 2021. Pengaruh eksternal lainnya adalah pertumbuhan ekonomi yang baik berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya kemampuan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Berikut ini grafik yang menunjukkan hubungan antara alokasi anggaran terhadap capaian Rasio Elektrifikasi selama periode waktu 2014-2020 :



Tabel 2.5 Perbandingan Capaian RE Nasional dengan Provinsi NTB Tahun 2017-2023

Realisasi rasio elektrifikasi Provinsi NTB selalu melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan bila dirata-rata, deviasi selama tahun 2017-2023 sebesar **+7,47%**. Angka ini melebihi angka secara nasional sepanjang tahun 2017-2023, yaitu sebesar **+2,42%**. Perbandingan Realisasi Capaian Rasio Elektrifikasi Nasional dengan Provinsi NTB Tahun 2017 s/d 2023 sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.4 Perbandingan Capaian RE Nasional dengan Provinsi NTB Tahun 2017-2023



Tabel 2.6 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas ESDM Provinsin NTB dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pd Awal Tahun renc 2023	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penan ggung jawab
							2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026		
1	2	3	4	5	6		9		10		11		14		15		16		19-14/9*100%		20=15/10* 100%		21=16/11*100 %		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terpenuhi nya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Urusan Pilihan																							
		Bidang Urusan ESDM																							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	73.51	80	33,510,422,630	78	9,922,288,818	79	11,404,948 ,811	80	14,026,636,92 6													
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan aan dan evaluasi	7	25	1,655,156,469	9	475,756,400	8	506,847,35 4	8	672,552,715													
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	1	4	398,359,250	2	123,028,300	1	101,412,07 6	1	173,918,874													
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen	1	3	159,608,014	1	44,795,000	1	51,488,592	1	63,324,422													
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah laporan	1	3	141,006,616	1	39,574,400	1	45,487,892	1	55,944,324													
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah laporan	1	3	131,296,877	1	36,849,300	1	42,355,588	1	52,091,988													
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah laporan	1	3	143,918,719	1	40,391,700	1	46,427,319	1	57,099,700													
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	1	3	142,942,436	1	40,117,700	1	46,112,376	1	56,712,360													
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan	1	6	538,024,558	2	151,000,000	2	173,563,51 0	2	213,461,049													
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah laporan	1	3	27,537,157,609	1	7,728,477,698	1	8,883,322, 602	1	10,925,357,30 9													
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	90	78	27,204,141,501	76	7,635,014,618	77	8,775,893, 594	78	10,793,233,28 9													



No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pd Awal Tahun renc 2023	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penanggung jawab	
						2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
1	2	3	4	5	6		9		10		11		14		15		16		19-14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen	1	3	148,152,723	1	41,580,000	1	47,793,184	1	58,779,539													
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan	1	3	17,871,323	1	5,015,700	1	5,765,182	1	7,090,441													
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan	1	3	68,419,621	1	19,202,400	1	22,071,761	1	27,145,460													
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	1	3	59,216,551	1	16,619,500	1	19,102,906	1	23,494,145													
		Pengelblaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen	1	3	3,563,077	1	1,000,000	1	1,149,427	1	1,413,649													
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan	1	3	17,820,656	1	5,001,480	1	5,748,837	1	7,070,339													
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan	12	36	17,972,158	12	5,044,000	12	5,797,711	12	7,130,447													
		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah laporan	1	3	141,969,716	1	39,844,700	1	45,798,583	1	56,326,433													
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen	1	3	10,115,931	1	2,839,100	1	3,263,339	1	4,013,492													
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan	0	3	51,384,908	1	14,421,500	1	16,576,465	1	20,386,944													
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan	0	3	53,446,148	1	15,000,000	1	17,241,408	1	21,204,740													
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen	1	3	20,659,074	1	5,798,100	1	6,664,494	1	8,196,480													
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan	1	3	6,363,655	1	1,786,000	1	2,052,877	1	2,524,778													
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah laporan	1	3	206,641,337	1	69,995,200	1	80,454,388	1	98,948,667													



No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pd Awal Tahun renc 2023	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penanggung jawab	
						2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
1	2	3	4	5	6		9		10		11		14		15		16		19-14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah laporan	0	3	16,589,684	1	4,656,000	1	5,351,733	1	6,581,951													
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan	0	36	11,897,825	1	3,339,200	1	3,838,167	1	4,720,458													
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan	0	3	178,153,827	1	50,000,000	1	57,471,361	1	70,682,466													
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah laporan	1	3	1,163,711,566	1	364,686,500	1	304,180,589	1	515,538,826													
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	8	12	35,596,204	11	9,990,300	12	11,483,123	12	14,122,781													
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	4	5	89,041,995	4	24,990,200	4	28,724,416	5	35,327,379													
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis	0	6	128,926,362	4	36,184,000	5	41,590,874	6	51,151,487													
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis	10	12	59,259,664	7	16,631,600	10	19,116,814	12	23,511,250													
		Penyediaan Bahan/Material	Jenis	0	20	34,714,698	17	9,742,900	20	11,198,754	20	13,773,044													
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Orang	0	3166	71,211,648	966	19,986,000	1000	22,972,452	1200	28,253,195													
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1	3	744,960,995	1	241,353,500	1	162,418,282	1	341,189,213													
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Unit	5	64	595,809,085	25	623,284,320	18	871,419,962	21	881,105,461													
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	5	32	375,809,085	10	105,473,200	10	121,233,767	12	149,102,118													
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tahun	1	3	1,272,748,757	1	357,205,000	1	410,581,149	1	504,962,608													
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat	1700	6300	15,481,568	1800	4,345,000	2000	4,994,261	2500	6,142,306													



No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pd Awal Tahun renc 2023	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penanggung jawab	
						2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6		9		10		11		14		15		16		19-14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening	3	3	569,735,939	3	159,900,000	3	183,793,412	3	226,042,528													
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Buah	24	72	46,177,472	24	12,960,000	24	14,896,577	24	18,320,895													
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	4	8	641,353,778	6	180,000,000	6	206,896,899	8	254,456,879													
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tahun	1	3	937,228,091	1	263,039,000	1	302,344,185	1	371,844,906													
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	7	11	170,528,843	7	47,860,000	9	55,011,587	11	67,657,257													
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	8	12	520,209,175	8	146,000,000	10	167,816,373	12	206,392,802													
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	27	30	69,301,839	27	19,450,000	30	22,356,359	30	27,495,479													
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase hasil evaluasi pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB	-	100	1,975,352,499	100	552,652,320	100	638,018,521	100	784,681,658													
		PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan hasil pemantauan kondisi lingkungan air tanah	-	10	1,314,483,429	10	367,758,320	10	424,564,615	10	522,160,494													



No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pd Awal Tahun renc 2023	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penan ggung jawab	
						2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
1	2	3	4	5	6		9		10		11		14		15		16		19-14/9*100%		20=15/10* 100%		21=16/11*100 %		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen	-	10	216,707,609	10	60,629,160	10	69,994,327	10	86,084,122													
		Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Peta	-	3	990,546,423	1	277,129,160	1	319,936,297	1	393,480,966													
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan	-	3	107,229,397	1	30,000,000	1	34,633,991	1	42,595,406													
		PENATAUSAHAAN IZIN PENGEBORAN, IZIN PENGALIAN, IZIN PEMAKAIAN, dan IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI	Jumlah data pengusah aan air tanah	-	10	357,281,202	10	99,958,000	10	115,398,150	10	141,925,052													
		Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah rekomend asi	124	155	214,423,051	45	59,990,000	50	69,256,438	60	85,176,613													
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Izin	40	130	142,858,151	40	39,968,000	40	46,141,712	50	56,748,439													
		PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DALAM PROVINSI	Jumlah laporan hasil survey potensi air tanah	-	10	303,587,869	10	84,936,000	10	98,055,756	10	120,596,112													
		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen	-	9	142,858,151	3	39,968,000	3	46,141,712	3	56,748,439													



No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pd Awal Tahun renc 2023	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penanggung jawab	
						2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
1	2	3	4	5	6		9		10		11		14		15		16		19-14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen	-	9	53,500,320	3	14,968,000	3	17,280,053	3	21,252,268													
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan	-	3	107,229,397	1	30,000,000	1	34,633,991	1	42,595,406													
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Jumlah wilayah izin pertambahan yang dikendalikan	261	89	1,007,823,009	27	281,962,700	30	325,516,456	32	400,343,853													
		PENATAUSAHAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM atau BATUAN dalam RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI pada WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH yang BERADA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI TERMASUK WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL LAUT	Jumlah wilayah izin usaha pertambahan mineral bukan logam dan batuan yang dikendalikan	234	210	418,068,475	55	116,964,700	65	135,031,813	90	166,071,961													
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	234	115	268,072,420	30	74,999,700	35	86,584,632	50	106,488,088													



No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pd Awal Tahun renc 2023	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penanggung jawab
							2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026		
1	2	3	4	5	6		9		10		11		14		15		16		19-14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi	234	95	149,996,055	25	41,965,000	30	48,447,181	40	59,583,873													
		PENATAUSAHAAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK KOMODITAS MINERAL LOGAM, BATUBARA, MINERAL BUKAN LOGAM, dan BATUAN dalam WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT	Jumlah izin pertambangan rakyat yang dikendalikan dalam wilayah pertambangan rakyat	5	10	321,681,042	5	89,998,000	7	103,899,665	10	127,783,377													
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Dokumen	-	15	178,708,513	5	49,998,000	5	57,721,010	5	70,989,503													
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah IPR yang diawasi dan dikendalikan	5	10	142,972,529	5	40,000,000	7	46,178,655	10	56,793,874													



No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pd Awal Tahun renc 2023	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penanggung jawab
							2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026		
1	2	3	4	5	6		9		10		11		14		15		16		19-14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Jumlah data konservasi mineral dan batubara yang dikendalikan	10	195	268,073,492	55	75,000,000	63	86,584,978	77	106,488,514													
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah izin yang diawasi dan dikendalikan	10	195	268,073,492	55	75,000,000	63	86,584,978	77	106,488,514													
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik	8.49	5.57	1,882,329,210	5.96	526,626,820	5.64	607,972,956	5.57	747,729,434													
		PENATAUSAHAAN IZIN, PEMBINAAN, dan PENGAWASAN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) sebagai BAHAN BAKAR LAIN DENGAN KAPASITAS PENYEDIAAN sampai dengan 10.000 (SEPULUH RIBU) TON PER TAHUN	Jumlah pengelola usaha niaga BBN yang dibangun dan diawasi (Izin)	2	6	214,456,006	2	59,999,220	2	69,267,082	2	85,189,704													
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Rekomendasi	-	6	131,729,920	2	36,854,610	2	42,547,408	2	52,327,902													



No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pd Awal Tahun renc 2023	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penanggung jawab	
						2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
1	2	3	4	5	6		9		10		11		14		15		16		19-14/9*100%		20=15/10* 100%		21=16/11*100 %		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Izin	2	6	82,726,086	2	23,144,610	2	26,719,674	2	32,861,802													
		PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI DI WILAYAH PROVINSI	Jumlah fasilitas energi baru terbarukan yang dibangun (unit)	391	46	1,667,873,204	1	466,627,600	20	538,705,874	25	662,539,730													
		Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah Dokumen	-	3	356,100,249	1	99,627,600	1	115,016,714	1	141,455,934													
		Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah masyarakat yang paham konservasi energi (Orang)	150	300	268,073,492	100	75,000,000	100	86,584,978	100	106,488,514													
		Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah fasilitas EBT yang dibangun	391	46	1,043,699,463	1	292,000,000	20	337,104,182	25	414,595,282													
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (Rumah Tangga)	16577	2900	5,379,628,786	800	1,505,080,400	900	1,737,564,714	1200	2,136,983,672													



No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pd Awal Tahun renc 2023	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penanggung jawab	
						2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
1	2	3	4	5	6		9		10		11		14		15		16		19-14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PENATAUSAHAAN IZIN USAH PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK NON BADAN USAHA MILIK NEGARA dan PENJUALAN TENAGA LISTRIK serta PENYEWAAN JARINGAN KEPADA PENYEDIA TENAGA LISTRIK DALAM DAERAH PROVINSI	Jumlah pertimbangan teknis perizinan berusaha bidang ketenagalistrikan yang diterbitkan	57	90	285,942,199	28	79,999,200	30	92,356,386	32	113,586,613													
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi	57	90	178,715,304	28	49,999,900	30	57,723,203	32	70,992,201													
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin	57	90	107,226,895	28	29,999,300	30	34,633,183	32	42,594,412													
		PENATAUSAHAAN IZIN OPERASI yang FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI	Jumlah instalasi tenaga listrik yang diawasi dan dikendalikan	67	90	285,885,367	28	79,983,300	30	92,338,030	32	113,564,037													
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	67	90	178,694,216	28	49,994,000	30	57,716,392	32	70,983,824													



No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pd Awal Tahun renc 2023	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penan ggung jawab	
						2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
1	2	3	4	5	6		9		10		11		14		15		16		19-14/9*100%		20=15/10* 100%		21=16/11*100 %		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin yang dikendalikan an dan diawasi	67	90	107,191,152	28	29,989,300	30	34,621,638	32	42,580,213													
		PENGANGGARAN untuk KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU, PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL dan PEDESAAN	Jumlah sarana penyediaa n tenaga listrik yang terbangun	16577	2900	4,807,801,220	800	1,345,097,900	900	1,552,870,297	1200	1,909,833,022													
		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen	1	3	268,073,492	1	75,000,000	1	86,584,978	1	106,488,514													
		Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana penyediaa n tenaga listrik yang dibangun	16577	2900	4,539,727,728	800	1,270,097,900	900	1,466,285,319	1200	1,803,344,508													



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi NTB sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- Pengendalian pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang dinilai dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rasio Elektrifikasi selama 5 tahun (2019 s/d 2023) dapat dikatakan sangat baik. Realisasi selalu di atas target yang telah ditetapkan. Selama 5 tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil meningkatkan Rasio Elektrifikasi **dari 64,43% menjadi 93,83% atau 29,40% atau rata-rata pertahun meningkat sebesar 5,88%**. Selanjutnya dalam RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 Dinas ESDM Provinsi diberi tanggungjawab untuk mendukung Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari :

Tabel 2.7 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang ESDM Provinsi NTB

Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPD	Tahun			Kondisi Akhir RPD
		2023	2024	2025	2026	
Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang	%	5,5-6,9	5,8-7,1	6-7,5	6,2-7,8	5,5-6,9
- Kontribusi sektor tambang	%	21,4	22,15	22,98	23,68	23,68
Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	19,64	19,70	19,76	19,82	19,82
- Implementasi pembangunan rendah karbon sektor energi	Rp. (juta)	109,97	2.290	2.413	2.561	7.264
- Bauran energi baru terbarukan	%	20,44	22,72	23,86	25,00	25,00

Untuk mencapai target sasaran strategis tersebut Dinas ESDM Provinsi NTB akan menyelenggarakan 5 (lima) program dengan 21 Kegiatan dan 78 Sub kegiatan yang terdiri dari:

- Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator Nilai SAKIP;
- Program pengelolaan aspek kegeologian dengan indikator persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan;
- Program pengelolaan mineral dan batubara dengan indikator persentase izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang melaksanakan *good mining practice*;
- Program pengelolaan energi terbarukan dengan indikator persentase energi baruterbarukan dalam bauran energi; dan
- Program pengelolaan ketenagalistrikan dengan indikator rasio elektrifikasi.

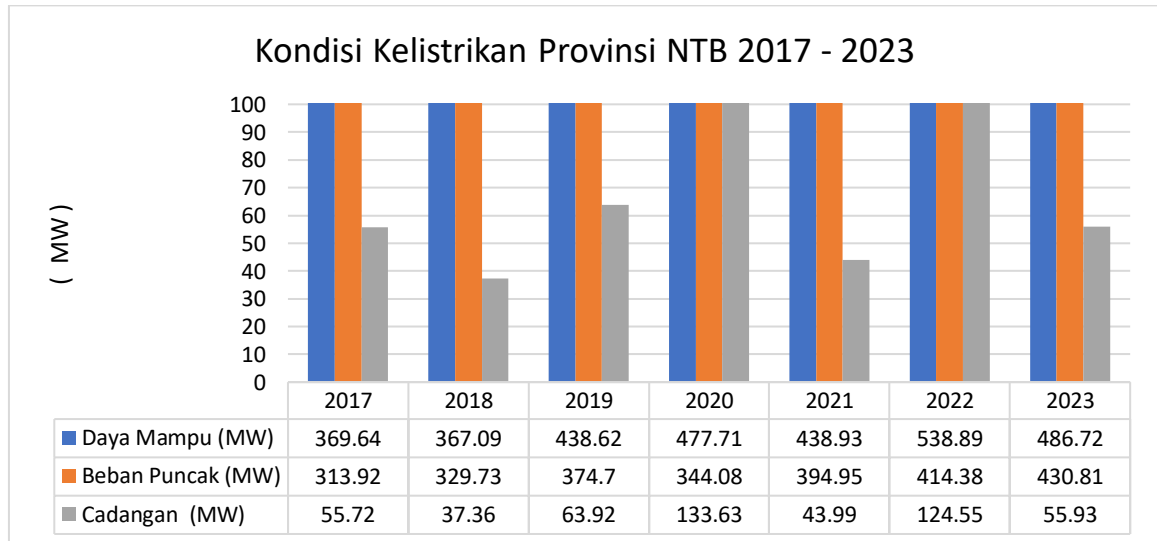


Melalui pelaksanaan program-program tersebut juga telah disesuaikan target dan indikator kinerja masing-masing kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kemampuan fiskal yang ada periode 2024-2026 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	Periode Renstra 2024-2026		
			2024	2025	2026
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dan pemanfaatan energi listrik oleh masyarakat	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapatkan layanan listrik (%)	%	1,18	1,18	1,18
	Konsumsi Listrik Perkapita	kWh/kapita	801,84	826,83	857,42
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	%	22,72	23,86	25,00
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan (%)	%	7,88	8,96	10,04
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase izin usaha pertambangan yang menerapkan GMP (%)	%	9,50	10,06	11,17

Pelaksanaan program-program tersebut diharapkan akan dapat menjawab permasalahan dan isu strategis Daerah serta dapat memenuhi target capaian Indikator Kinerja yang menjadi tanggungjawab Dinas ESDM.

Sejak Tahun 2014 kondisi kelistrikan Provinsi NTB semakin membaik, sampai dengan akhir Tahun 2023 daya mampu sebesar 486,72 MW dengan beban puncak 430.81 MW sehingga terdapat cadangan sebesar 55.93 MW yang masuk dalam kategori Normal. Untuk melihat perkembangan kondisi kelistrikan Provinsi NTB dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini :



Gambar 2.6 Perkembangan Kondisi Kelistrikan NTB Tahun 2017- 2023

Selain bertugas untuk memenuhi kebutuhan dasar listrik bagi masyarakat, Dinas ESDM juga diberi tugas untuk meningkatkan kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi, meningkatkan konservasi air tanah dan meningkatkan penerapan pertambangan yang abai dan benar. Sampai dengan 2020 Dinas ESDM Provinsi NTB juga diberi tugas untuk berkontribusi terhadap peningkatan cakupan air minum bersama dinas PUPR, dari target 600 KK pada tahun 2015-2020 terdapat capaian tertinggi pada tahun 2016 sebesar 3,07 dan capaian terendah pada tahun 2020 sebesar 0,56. Sedangkan untuk target tahun 2019 sebesar 2.040 KK dengan realisasi 2.125 dengan



capaian 1,04. Capaian tersebut didasarkan atas kemampuan fiskal Dinas dalam mendanai pembangunan sumur bor melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah.

Tabel 2.8 Capaian Rasio Elektrifikasi Hingga Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH PELANGGAN RUMAH TANGGA PLN	JUMLAH PELANGGAN RUMAH TANGGA NON PLN	JUMLAH PELANGGAN RUMAH TANGGA TOTAL	RE PLN (%)	RE TOTAL (%)
	NUSA TENGGARA BARAT	1.768.170	1.763.862	2.005	1.765.867	99,75	99,98
1	KOTA MATARAM	149.844	149.844	0	149.844	99,99	99,99
2	KAB. LOMBOK BARAT	263.011	262.623	0	262.623	99,84	99,99
3	KAB. LOMBOK TENGAH	348.207	348.157	0	348.157	99,98	99,99
4	KAB. LOMBOK TIMUR	430.395	429.926	0	429.926	99,88	99,99
5	KAB. LOMBOK UTARA	86.062	85.525	0	85.525	99,33	99,99
6	KOTA BIMA	50.739	50.739	0	50.739	99,99	99,99
7	KAB. BIMA	147.179	146.839	0	146.839	99,64	99,88
8	KAB. DOMPU	86.462	86.194	0	86.194	99,66	99,99
9	KAB. SUMBAWA	161.848	160.055	1.542	161.597	99,27	99,99
10	Kab. Sumbawa Barat	44.423	43.960	463	44.423	98,95	99,99

Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bisa menikmati aliran listrik dengan total jumlah penduduk. Rasio elektrifikasi NTB sampai dengan akhir Desember 2023 mencapai 99,98 % telah mencapai target rencana sebesar 99,98 %.

Namun dari pencapaian realisasi Elektrifikasi Provinsi NTB tersebut, masih terdapat beberapa desa belum berlistrik terutama didaerah terpencil. Usaha terus diupayakan pemerintah bersama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PT. PLN untuk memperluas akses ketenagalistrikan ke seluruh wilayah Provinsi NTB. Hal itu dilakukan dengan pembangunan pembangkit listrik maupun perluasan jaringan listrik.

Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, pemerintah akan terus mempercepat program penyediaan listrik melalui sinergi pemerintah pusat, daerah dan PT. PLN. Pemerintah juga memberi kesempatan swasta melalui peningkatan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan yang sesuai dengan potensi wilayah setempat.

Guna mendorong partisipasi swasta, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2016 yang menjamin pihak swasta bisa melakukan usaha penyediaan listrik yang terdiri dari pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan listrik ke konsumen dalam skala kecil.

1. Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang bersumber dari Dana APBN

Dalam program ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah melaksanakan pemasangan instalasi dalam rumah dan kWh-Meter bagi warga masyarakat miskin/kurang mampu sejumlah 1.500 Rumah Tangga (RT), yang tersebar di 9 wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara dengan rincian sebagai berikut dapat dilihat pada table sebagai berikut :

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga
1	Kota Mataram	9
2	Lombok Barat	110
3	Lombok Tengah	474
4	Lombok Timur	292
5	Lombok Utara	115



6	Sumbawa Barat	8
7	Sumbawa	316
8	Dompu	59
9	Kabupaten Bima	117
Jumlah		1.500

2. Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang bersumber dari dana APBD
Pemasangan Sambungan Listrik Murah dan Hemat Pulau Sumbawa : Kabupaten Sumbawa Barat 40 RTS, dan Kabupaten Sumbawa 20 RTS

Sementara itu pencapaian kinerja pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTB dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat dan melebihi target tahunan. Untuk tahun 2019 dari target RE sebesar 94,46% dicapai 99,55% dengan capaian 105,39%, sedangkan untuk tahun 2020 dengan sampai dengan bulan Mei 2020 berdasarkan laporan PLN dan perhitungan Dinas ESDM Provinsi NTB RE sebesar 116,00%. Data realisasi RE masih menjadi kendala dalam perhitungannya dimana masih diperlukan koreksi jumlah pemilik meter listrik dan jumlah penduduk yang masuk dalam perhitungan RE, untuk mengatasi hal tersebut PT.PLN (Persero) UIW Nusa Tenggara Barat berencana untuk melakukan survey dan pendataan jumlah pelanggan untuk dapat memilah pengguna dengan lebih satu meter listrik. Oleh karenanya, untuk sementara perhitungan pencapaian kinerja pelayanan Dinas menggunakan perhitungan dan perkiraan ideal RE. Berikut tabel yang menggambarkan pencapaian kinerja pelayanan dinas dari tahun 2018 sampai proyeksi tahun 2021.

Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	Rasio Elektrifikasi	-	Rasio Elektrifikasi	93,83	94,46	95,09	95,73	93,83	93,83	99,70	99,90	Pertumbuhan RE 2020 ke 2021 sebesar 0,2% diperkirakan semakin mendekati 100% maka pertumbuhan RE makin melambat



Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam 2019-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK Renstra 2019-2023 tahun ke 1	Target Indikator Lainnya	Target Renstra 2019-2023 Tahun ke 1-5					Realisasi Capaian Renstra 2019-2023 Tahun ke 1-4					Rasio Capaian Renstra 2019-2023 Tahun ke 1-4				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	-	94,46	-	94,46	95,09	99,77	99,88	99,99	99,55	99,98	99,98	99,98	-	1,05	1,05	1,00	1,00	-
2	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	-	13,07	-	13,07	14,17	15,76	17,43	19,18	9,18	11,29	13,89	20,44	-	0,70	0,80	0,88	1,17	-
3	Persentase pemanfaatan airtanah di kab/kota Provinsi NTB yang berkelanjutan (%)	-	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100		-	1,00	1,00	1,00	-
4	Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan Benar (%)	-	-	-	2,17	4,00	9,00	31,67	39,00	2,17	0,87	11,9	5,03		1,00	0,25	1,32	0,16	-



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas ESDM Provinsi NTB, baik sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun setelahnya tetap melakukan koordinasi dengan perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota maupun dengan Kementerian ESDM termasuk dengan Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa. Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur tentang pembagian kewenangan antar pemerintah, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi NTB melalui Bappeda Kabupaten/Kota maupun Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan dengan Kementerian maupun instansi/lembaga vertikal terkait tetap dilakukan dan terus ditingkatkan.

Tentunya terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi NTB. Permasalahan-permasalahan tersebut dikelompokkan dalam bidang-bidang sebagai berikut:

1. Bidang Mineral dan Batubara

- a. Sampai dengan akhir tahun 2021, seluruh kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pelimpahan kewenangan Izin Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pertambangan Rakyat melalui Perpres 55 Tahun 2022 terbit pada tanggal 11 April 2022.
- b. Dinas ESDM telah melakukan langkah-langkah strategis terkait persiapan dan masa transisi peralihan kewenangan perizinan IUP Bukan Logam dan Batuan serta Izin Pertambangan Rakyat dengan berkoordinasi dengan Ditjen Minerba KESDM, DPMPTSM Provinsi NTB, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- c. Terkait dengan pendelegasian kewenangan pengelolaan pertambangan mineral non logam dan batuan, pada tanggal 8 Agustus 2022 telah dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Perizinan dan Non Perizinan kepada Pemerintah Provinsi.
- d. Saat ini proses perizinan IUP batuan sudah berjalan normal di Provinsi NTB.
- e. Pemerintah melalui Kepmen ESDM No. 89.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi NTB telah menetapkan Wilayah Pertambangan Provinsi NTB pada tanggal 21 April 2022 (2 WPR berada pada Kabupaten Lombok Barat). Melalui dukungan UNDP, saat ini sedang dalam proses penyusunan KLHS WPR Lombok Barat. Menyusul Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 10 November 2022 Kabupaten Sumbawa telah menyerahkan dokumen kelengkapan usulan WPR melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.
- f. Masih terdapat potensi sumberdaya mineral dan bahan galian yang belum diketahui jumlah dan posisinya secara akurat.
- g. Belum optimalnya pemanfaatan Informasi Wilayah Pertambangan mineral dan batubara dikarenakan keterbatasan data dan sumber daya manusia.
- h. Masih adanya kegiatan pertambangan tanpa izin baik mineral logam maupun batuan yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan akibat degradasi lahan.
- i. Masih rendahnya kesadaran pelaku kegiatan usaha pertambangan dalam penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Pertambangan sesuai kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar.
- j. Pengawasan kegiatan usaha pertambangan yang belum optimal terkendala dengan jumlah anggaran dan personil pengawas, juga adanya pendelegasian pemberian perizinan usaha bidang pertambangan mineral dan batubara yang belum dilaksanakan secara menyeluruh.



- k. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB semakin menurun dipengaruhi oleh kinerja perusahaan pertambangan dan larangan ekspor konsentrat.
- l. Belum terlaksanannya rencana pengembangan industri pengolahan dan pemurnian mineral logam dalam upaya peningkatan nilai tambah produk pertambangan.
- m. Pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi tambang terutama pada tambang batuan belum optimal.
- n. Belum tersedianya regulasi terkait legalisasi pertambangan.

2. Bidang Geologi dan Air Tanah

- a. Terdapat 9 CAT yang sampai dengan saat ini baru 7 CAT yang sudah dilakukan inventarisasi dan dibuat zona pemanfaatannya (data 2004) , idealnya reuiu CAT dilakukan setiap 5 tahun, selain itu belum semua wilayah NTB memiliki zona CAT terutama untuk bagian selatan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
- b. Disebabkan adanya perubahan peraturan Perundang-undangan dimana berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Izin pemanfaatan air tanah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pelaksanaanya mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor : 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah (SIP, SIPA, dan SPAM)
- c. Perlunya dilakukan perbaikan atau revisi terkait Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah perlu di revisi sesuai Perundangan yang baru.

3. Bidang Ketenagalistrikan

- a. Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi NTB 2023 sebesar 99,98 %. (data PLN).
- b. Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100% dari jumlah 1.143 Desa/Kel (data PLN).
- c. Sejak tahun 2012 s/d 2022 telah dilaksanakan penyambungan Listrik Murah dan Hemat bagi 31.828 RTS kategori miskin baik melalui sumber APBN, APBD dan sumber lainnya. Selain itu, melalui anggaran CSR PLN telah dipasang sebanyak 2.700 RTS di seluruh NTB.
- d. Untuk TA 2023 melalui APBD telah dilaksanakan pekerjaan sambungan listrik gratis untuk 60 RTS di Pulau Sumbawa.
- e. Selain itu, terdapat program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang didanai oleh APBN untuk 1.750 RTS di seluruh Wilayah NTB.
- f. Melalui dana shadaqoh karyawan PLN, program *Light up the Dream* juga akan menyalakan 45 RTS kategori miskin dfi seluruh NTB.
- g. Program Lisdes PLN yang dibiayai oleh PMN untuk melistriki 34 desa (perluasan jaringan) dan 1.125 RTS di tahun 2023 serta 47 desa (perluasan jaringan) dan 1.840 RTS di tahun 2024.
- h. Sejak tahun 2009-2018 telah terbangun pembangkit listrik EBT yang terdiri dari 59 Unit PLTS Komunal dengan kapasitas 3.172 kWp, 10.366 Unit PLTS Tersebar dengan kapasitas 578,16 kWp, 7 Unit PLTMH dengan kapasitas 14.593 kW. Serta LTSHE pada tahun 2017 dan 2019 sebanyak 2.709 Unit.
- i. Melalui dana APBN dan BPD LH, telah dibangun PLTS Atap di 6 Lokasi masing-masing di Kantor Walikota Mataram, Kantor Bupati Dompu, UTS Sumbawa, SMKN 3 Mataram., RSUD Narmada Awet Muda dan RSUD Tripat Gerung.
- j. Hibah dari Pemerintah Inggris melalui Mentari *Project* untuk PLTMH *on grid* Pandan Duri 580 kW di Kab. Lombok Timur.
- k. *Groundbreaking* Pabrik *Compressed Biogas* (CBG) pertama di Indonesia yang menggunakan limbah tongkol jagung dengan kapasitas 10 ton biogas per hari.



- l. Pembangunan *solar dryer* untuk biji kopi bekerjasama dengan Yayasan Rumah Energi/HIVOS dan KWT di Desa Karang Sidemen, Kab. Lombok Tengah.
- m. *Launching NTB Energy Master Plan Net Zero Emissions 2050* yang dibantu oleh Denmark dan ICLEI.
- n. Merintis berdirinya bengkel konversi motor BBM ke motor Listrik di SMK 3 Mataram dan SMK 1 Jonggat.
- o. **Terkait status masyarakat miskin / tidak mampu yang telah terdaftar pada Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan menerima bantuan listrik murah dan hemat daya 450 VA bersubsidi seringkali berubah-ubah sehingga menjadi kendala/penghambat disaat dilakukan pendaftaran sebagai calon pelanggan di PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan.**
- p. **Harmonisasi pimpinan dari PT.PLN (Persero) Unit Induk Wilayah sampai dengan PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan terkait pelaksanaan pemasangan kWh-meter yang sering tidak sinkron.**

4. Bidang Energi

- a. Kendala Legislatif dan Peraturan
 - ✓ Proses Perizinan Penggunaan Kawasan, Hutan agak lama karena harus mendapat pengesahan dari Kementerian Kehutanan di Jakarta;
 - ✓ Tidak sinkronnya dokumen perencanaan energi dan kelistrikan pemerintah (RUEN/ RUED – P) dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik Milik PLN (RUPTL)
- b. Kendala Ekonomi
 - ✓ Plafon Kredit Bank Lokal Terbatas
 - ✓ Biaya tambahan untuk menyewa konsultan teknis ternama
 - ✓ Khusus untuk pengembangan Waste To Energy, Tipping Fee terlampau rendah tidak menarik untuk insvestor
 - ✓ Anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan energi terbarukan terbatas
- c. Kendala Teknis
 - ✓ Isu Intermittency terutama untuk pengembangan PLTS dan PLT Proyek
 - ✓ Terbatasnya kontraktor yang berkualifikasi baik dari komunitas sekitar area proyek
 - ✓ Pada proses pembebasan lahan dimana harga lahan yang diajukan masyarakat meningkat 3-4 kali harga sebelumnya setelah dilakukan sosialisasi pembangunan pembangkit EBT kepada masyarakat yang ada dilingkungan tersebut.

Khusus untuk urusan pemerintahan bidang ESDM, untuk meningkatkan pelayanan perangkat daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar terutama listrik dan air bersih bagi masyarakat miskin ada beberapa tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan, sebagai berikut:

1. Tantangan
 - a. Sebagai daerah rawan bencana alam, diperlukan penelitian dan pengembangan terkait teknologi untuk mitigasi bencana.
 - b. Pelestarian Geopark Rinjani sebagai UNESCO Global Geopark dan Geopark Tambora sebagai geopark nasional yang memerlukan koordinasi dan dukungan lintas sektor.
 - c. Keberadaan pertambangan tanpa izin dengan lokasi yang tersebar hampir di seluruh kabupaten memerlukan penanganan yang serius melalui pelibatan lintas instansi/lembaga.
 - d. Meningkatkan pemahaman masyarakat untuk melakukan konservasi energi melalui penggunaan energi baru terbarukan.



- e. Pemanfaatan potensi air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air bersih.
 - f. Mengurangi jumlah pengguna listrik tidak mandiri melalui bantuan pemasangan listrik murah dan hemat bagi masyarakat miskin.
2. Peluang
- a. Potensi pemanfaatan sektor ESDM yang cukup besar;
 - b. Komitmen dalam negeri untuk menyelenggarakan pengelolaan sektor ESDM berkelanjutan yang cukup tinggi;
 - c. Dukungan Internasional yang besar untuk pengembangan bidang energi baru terbarukan yang berkelanjutan;
 - d. Keberadaan potensi ESDM, stakeholder dan peran serta masyarakat yang tinggi dalam mendukung pembangunan nasional;
 - e. Permintaan dan tingkat kebutuhan terhadap hasil sumberdaya ESDM;
 - f. Meningkatnya kemajuan IPTEK;
 - g. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah yang berpihak kepada masyarakat sekitar;
 - h. Sistem perizinan pemanfaatan ESDM cukup selektif;
 - i. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan pemanfaatan sektor ESDM.

Dinas ESDM Provinsi NTB telah melakukan pencapaian yang sangat baik melalui pencapaian Indikator Kinerja Daerah, yaitu Rasio Elektrifikasi. Namun demikian masih menyisakan berbagai permasalahan dalam bidang energi dan sumber daya mineral diantaranya terkait Sub Urusan Pemerintahan Bidang Geologi, Mineral dan Batubara, Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dari beberapa permasalahan tersebut dapat dirumuskan isu strategis atau isu penting, yaitu:

1. Masih adanya kegiatan pertambangan tanpa ijin yang lokasinya tersebar di seluruh Kabupaten.
2. Masih ada rumah tangga yang belum berlistrik secara mandiri.
3. Rendahnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi.
4. Belum optimalnya Usaha Konservasi air tanah.

Namun demikian penanganan Isu Strategis Tahun 2023 tidak semua dapat dilakukan pasca diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2023 serta terbitnya dua Undang-Undang diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Beberapa Isu Strategis yang dimungkinkan tidak dapat dilaksanakan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah terkait :

1. Mitigasi bencana alam dan geologi
2. Pengembangan *Geopark*.
3. Pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan air bersih, dan
4. Pertambangan tanpa izin.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tersedia dalam rangka penanganan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang telah disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi berdasarkan Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB adalah sebagai berikut :



Tabel 2.10 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang ESDM

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANA KEGIATAN
3	29				URUSAN EERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Rasio Elektrifikasi (%)	DINAS ESDM NTB
3	29	02			PROGRAM PENGEOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	Prosentase zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan (%)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah zona konservasi air tanah yang dievaluasi (zona)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Data CAT (Dokumen)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Penetapan CAT (Dokumen)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Izin Pengambilan air tanah yang diawasi dan dikendalikan (Izin)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.02		Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah perizinan air tanah yang dikendalikan (Izin)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah prosedur dan persyaratan izin (Dokumen)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan (Rekomendasi)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalan, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Izin Pengambilan air tanah yang diawasi dan dikendalikan (Izin)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah NPA Kab/Kota yang dievaluasi (Buah)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah data NPA (Dokumen)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.03	02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah penetapan NPA (Dokumen)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah pemanfaatan NPA (Dokumen)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase IUP yang melaksanakan GMP (%)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.02		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah izin Pertambangan Mineral Logam yang dikendalikan (Izin)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah prosedur dan persyaratan izin (Dokumen)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan (Rekomendasi)	Bidang Mineral dan Batubara



KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANA KEGIATAN
3	29	03	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi (Izin)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.02	04	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah izin yang diawasi (Izin)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah izin pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dikendalikan	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.03	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah prosedur dan persyaratan izin (Dokumen)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah usulan WUP (Dokumen)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.03	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Rekomendasi Teknis yang diterbitkan (Rekomendasi)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi (Izin)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.03	05	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah izin yang diawasi (Izin)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah izin pertambangan yang melaporkan produksinya (izin)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.07	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah data harga patokan mineral bukan logam dan batuan (Dokumen)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.07	02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Dokumen)	Bidang Mineral dan Batubara



KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANA KEGIATAN
3	29	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Dokumen)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)	Bidang Energi
3	29	05	1.03		Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah pengelola usaha niaga BBN yang dibina dan diawasi (Izin)	Bidang Energi
3	29	05	1.03	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah prosedur dan persyaratan izin (Dokumen)	Bidang Energi
3	29	05	1.03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan (Rekomendasi)	Bidang Energi
3	29	05	1.03	03	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah izin yang dibina (Izin)	Bidang Energi
3	29	05	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi (Izin)	Bidang Energi
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana EBT yang dibangun (Unit)	Bidang Energi
3	29	05	1.04	01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah kebijakan (Dokumen)	Bidang Energi
3	29	05	1.04	02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang ditingkatkan (Orang)	Bidang Energi
3	29	05	1.04	03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi (Orang)	Bidang Energi
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah fasilitas EBT yang dibangun (Unit)	Bidang Energi
3	29	05	1.04	06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta bintek (Orang)	Bidang Energi
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola EBT yang dibina dan diawasi (Unit)	Bidang Energi
3	29	05	1.0X		Pengembangan Sarana Prasarana EBT	1. Jumlah sarana dan prasarana EBT yang dibangun (Unit)	Bidang Energi
3	29	05	1.0X	01	Pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT	Jumlah pembangkit listrik EBT yang dibangun (Unit)	Bidang Energi
3	29	05	1.0X	02	Pembangunan instalasi bio energi	Jumlah instalasi bio energi yang dibangun (Unit)	Bidang Energi
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)	Bidang Ketenagalistrikan



KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANA KEGIATAN
3	29	06	1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin ketenagalistrikan yang dikendalikan (Izin)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.01	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah prosedur dan persyaratan izin (Dokumen)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan (Rekomendasi)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi (Izin)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin Operasi ketenagalistrikan yang diawasi	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah prosedur dan persyaratan izin Operasi (Dokumen)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan (Rekomendasi)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi (Izin)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang dipasang listrik murah dan hemat (RTS)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah data penerima penerima listrik murah dan hemat (Dokumen)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.06	02	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah SK Penerima Listrik Murah dan Hemat (Buah)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.06	03	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan (Dokumen)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.06	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah data dan informasi (Dokumen)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.06	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah laporan kordinasi dan sinkronisasi (Dokumen)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang dibangun (Unit)	Bidang Ketenagalistrikan



KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANA KEGIATAN
3	29	06	1.06	07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian (Dokumen)	Bidang Ketenagalistrikan

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang ESDM Tahun 2023 berdasarkan arahan Kementerian Dalam Negeri yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri **Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021**, beberapa arahan tersebut diantaranya :

Pencapaian prioritas pembangunan nasional bidang ketahanan energi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk:

1. Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P);
2. Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi (RUKD-P);
3. Percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dan layanan BBM satu harga, melalui:
 - a. Pemanfaatan potensi energi setempat, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, percepatan peningkatan rasio elektrifikasi serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan;
 - b. Pengawasan pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dan pengawasan penerapan tarif tenaga listrik oleh pemegang IUPTL;
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik, penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dan BBM satu harga bagi masyarakat terpencil;
4. Penyediaan database perijinan dan aset di bidang ESDM; dan
5. Pemeliharaan dan operasional aset-aset di bidang ESDM.

Arahan Pemerintah Pusat terkait penganggaran untuk urusan Pemerintahan Bidang ESDM di Provinsi tidak berbeda dengan arahan pada tahun sebelumnya. Hanya saja dalam rangka memenuhi arahan tersebut dilaksanakan melalui Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya pada sub bab ini.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal RPD Provinsi NTB Tahun 2024, terdapat 5 program, 21 kegiatan dan 78 Sub Kegiatan yang telah disiapkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang ESDM sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Namun sesuai dengan analisis kebutuhan yang sudah disusun akan digunakan 5 program 18 kegiatan dengan 62 kegiatan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 10.584.248.218,- yang terdiri dari belanja Operasional dan Belanja Modal yang sudah memasukkan kebutuhan bagi penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Kelima program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 terdiri dari :

- A. Induk Rp. 10.294.256.218,-
 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar Rp. 9.546.880.218,-;
 2. Program aspek kegeologian sebesar Rp. 100.000.000,-;
 3. Program pengelolaan mineral dan batubara sebesar Rp. 135.000.000,-;
 4. Program pengelolaan energi baru terbarukan sebesar Rp. 282.376.000,-;
 5. Program pengelolaan ketenagalistrikan sebesar Rp. 230.000.000,-.



B. Cabang Sumbawa : Rp. 289.992.000,-

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar Rp. 259.992.000,-;
2. Program aspek kegeologian sebesar Rp. 100.000,000,-;
3. Program pengelolaan mineral dan batubara sebesar Rp. 7.500.000,-;
4. Program pengelolaan energi baru terbarukan sebesar Rp. 7.500.000,-;
5. Program pengelolaan ketenagalistrikan sebesar Rp. 7.500.000,-.

Penyusunan rancangan diinput melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri melalui laman <https://ntbprov.sipd.kemendagri.go.id>. Anaisis kebutuhan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2024 didasarkan atas usulan masing-masing bidang pada Dinas ESDM Provinsi NTB. Review Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan Rancangan Awal RKPD dan Analisis Kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut:



Tabel 2.11 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi NTB

NO	RANCANGAN AWAL RPJMD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		Rasio Elektrifikasi		10,294,256,218.00		URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	11,365,882,199.00	
	Dinas Induk				10,294,256,218.00		Dinas Induk	11,069,932,039.00	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Mataram	Nilai SAKIP		9,546,880,218.00	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10,422,572,389.00	
A	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	9 Dokumen	373,000,000.00	A	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	238,583,200.00	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	123,000,000.00	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102,829,010.00	
02	Koodinasi dan Penyusunan RKA - SKPD	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Jumlah dokumenbRKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000.00	02	Koodinasi dan Penyusunan RKA - SKPD	10,371,200.00	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000.00	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	12,229,400.00	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000.00	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	11,171,950.00	
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	20,000,000.00	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	11,934,720.00	



NO	RANCANGAN AWAL RPJMD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
			Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	25,000,000.00	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,645,320.00	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	150,000,000.00	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78,401,600.00	
B	Administrasi Keuangan				8,161,222,098.00	B	Administrasi Keuangan	8,878,066,979.00	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/ Bulan	8,097,142,098.00	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,815,592,461.00	
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	41,580,000.00	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36,060,000.00	
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2,500,000.00	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3,459,060.00	
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	13,000,000.00	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15,535,208.00	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	7,000,000.00	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,420,250.00	



NO	RANCANGAN AWAL RPJMD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun SKPD						
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				18,000,000.00	C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8,182,400.00	
01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2,500,000.00	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2,462,200.00	
02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2,500,000.00	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2,356,300.00	
03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10,000,000.00	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1,129,300.00	
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	3,000,000.00	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,234,600.00	
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3,500,000.00	D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3,739,560.00	
01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	2,000,000.00	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2,040,040.00	
05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Unit	1,500,000.00	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1,699,520.00	
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah				123,070,000.00	E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	221,395,360.00	



NO	RANCANGAN AWAL RPJMD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1 Paket	2,500,000.00	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2,173,000.00	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	2,500,000.00	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22,800,000.00	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	1 Jenis	4,320,000.00	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4,320,000.00	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Dokumen	3,000,000.00	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,111,800.00	
07	Penyediaan Bahan/ Material	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Paket Bahan/ Material yang disediakan	1 Dokumen	3,500,000.00	07	Penyediaan Bahan/ Material	5,490,560.00	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7,250,000.00	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7,500,000.00	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	100,000,000.00	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175,000,000.00	
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				63,821,120.00	F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8,000,000.00	
05	Pengadaan Mebel	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	8,821,120.00	05	Pengadaan Mebel		
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua	Jumlah Unit Peralatan dan	8 Unit	55,000,000.00	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,000,000.00	



NO	RANCANGAN AWAL RPJMD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
		Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Mesin Lainnya yang disediakan						
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				508,768,000.00	G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	621,739,890.00	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1800 Laporan	2,500,000.00	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	155,303,490.00	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	159,900,000.00	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97,940,400.00	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Jenis	30,400,000.00	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	368,496,000.00	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	346,368,000.00	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				295,499,000.00	H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	442,865,000.00	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Alat atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	51,670,000.00	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51,670,000.00	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Alat atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	110,000,000.00	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan	110,000,000.00	



NO	RANCANGAN AWAL RPJMD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	22 Unit	14,100,000.00	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,880,000.00	
09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	49,729,000.00	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	271,315,000.00	
10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Mataram	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	340,000,000.00	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Liannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	40,000,000.00	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Liannya		
II	PROGRAM PENGEOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				100,000,000.00	II	PROGRAM PENGEOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	87,874,450.00	
A	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah zona konservasi air tanah yang dievaluasi (zona)		45,000,000.00	A	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	36,997,600.00	
01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	30,000,000.00	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	36,997,600.00	
03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	30,000,000.00		15,000,000.00				



NO	RANCANGAN AWAL RPJMD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
B	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				55,000,000.00	B	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	50,876,850.00	
01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	5 Dokumen	15,000,000.00	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	20,876,850.00	
02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	5 Laporan	15,000,000.00				
03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	5 Laporan	25,000,000.00	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	30,000,000.00	
III	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				135,000,000.00	III	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	133,961,575.00	
A	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut				45,000,000.00	A	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	93,999,975.00	
03	Penatausahaan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dalam	10 Dokumen	20,000,000.00	03	Penatausahaan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	37,000,000.00	



NO	RANCANGAN AWAL RPJMD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
	Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						
04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	10 Dokumen	25,000,000.00	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	56,999,975.00	
B	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk KomODITAS Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Loham dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				70,000,000.00	B	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk KomODITAS Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Loham dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	29,971,200.00	



NO	RANCANGAN AWAL RPJMD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
02	Koordinas dan Sikronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	25,000,000.00	02	Koordinas dan Sikronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	9,990,400.00	
03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komunitas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komunitas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	5 Dokumen	20,000,000.00	03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komunitas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	9,990,400.00	
04	Pengendalian dan Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1 Laporan	25,000,000.00	04	Pengendalian dan Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	9,990,400.00	
C	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan				20,000,000.00	C	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	9,990,400.00	



NO	RANCANGAN AWAL RPJMD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	10 Laporan	20,000,000.00	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	9,990,400.00	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				283,376,000.00	IV	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	200,527,925.00	
A	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun				20,000,000.00	A	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	19,495,375.00	
02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun		Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Dokumen	10,000,000.00	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	10,000,000.00	
04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai	1 Dokumen	10,000,000.00	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	9,495,375.00	



NO	RANCANGAN AWAL RPJMD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
			Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun						
B	Pengelolaan Penyediaan Biomaasa dan/ atau Biogas dalam wilayah provinsi				142,376,000.00	B	Pengelolaan Penyediaan Biomaasadan/ atau Biogas dalam wilayah provinsi	20,175,200.00	
01	Penyusunan dan Pemuktahiran data potensi biomassa	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen data potensi biomassa	1 Dokumen	20,000,000.00	01	Penyusunan dan Pemuktahiran data potensi biomassa		
06	Penyusunan dan Pemuktahiran data potensi biogas	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen data potensi biogas	1 Dokumen	20,000,000.00	06	Penyusunan dan Pemuktahiran data potensi biogas	20,175,200.00	
08	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	5 Laporan	102,376,000.00	08	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas		
C	Pengelolaan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi				50,000,000.00	C	Pengelolaan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi		
03	Pemeliharaan Infrastruktur biomassa dan/atau biogas		Jumlah Unit Infrastruktur biomassa dan/atau biogas	10 Unit	50,000,000.00	03	Pemeliharaan Infrastruktur biomassa dan/atau biogas		
D	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi		Jumlah Laporan pelaksanaan pembinaan dan pwnawasan aneka EBT (Kapasitas terpasang, investasi) di Daerah		50,000,000.00	D	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	139,968,650.00	
02	Pembinaan dan Pengawasan aneka EBT (Kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan pelaksanaan pembinaan dan pwnawasan aneka EBT (Kapasitas terpasang, investasi) di Daerah	1 Laporan	25,000,000.00	02	Pembinaan dan Pengawasan aneka EBT (Kapasitas terpasang, investasi) di daerah	124,968,650.00	



NO	RANCANGAN AWAL RPJMD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
10	Penyusunan dan Pemuktahiran data potensi aneka EBT di Daerah		Jumlah Dokumen data potensi aneka EBT di Daerah	1 Laporan	25,000,000.00	10	Penyusunan dan Pemuktahiran data potensi aneka EBT di Daerah	15,000,000.00	
E	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi				20,000,000.00	E	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	20,888,700.00	
03	Sosialisasi Konservasi energi kepada masyarakat	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	1 Laporan	20,000,000.00	03	Sosialisasi Konservasi energi kepada masyarakat	20,888,700.00	
V	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				230,000,000.00	V	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	224,995,700.00	
A	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				40,000,000.00	A	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	43,745,700.00	
02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	20,000,000.00	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	22,136,100.00	



NO	RANCANGAN AWAL RPJMD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	20,000,000.00	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	21,609,600.00	
B	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah				20,000,000.00	B	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah		
03	Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	20,000,000.00	03	Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi		
C	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan				170,000,000.00	C	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	181,250,000.00	
01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		Jumlah Dokumen terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	25,000,000.00	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	30,000,000.00	



NO	RANCANGAN AWAL RPJMD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Jumlah Sarana yang terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	75 Unit	145,000,000.00	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	151,250,000.00	
	Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa				289,992,000.00		Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa	295,950,160.00	
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				289,992,000.00	I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	295,950,160.00	
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				259,992,000.00	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	262,979,160.00	
A	Administrasi Umum Perangkat Daerah				21,000,000.00	A	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21,067,160.00	
02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	2,000,000.00	02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	2,008,460.00	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	2,000,000.00	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,033,700.00	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2,000,000.00	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,025,000.00	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	15,000,000.00	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15,000,000.00	
B	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				217,182,000.00	B	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216,882,000.00	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,500,000.00	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,506,000.00	



NO	RANCANGAN AWAL RPJMD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	26,754,000.00	02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	26,160,000.00	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	8 Laporan	188,928,000.00	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189,216,000.00	
C	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				21,810,000.00	C	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25,030,000.00	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraam Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit	21,810,000.00	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraam Dinas Operasional atau Lapangan	21,810,000.00	
						06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,220,000.00	
II	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				7,500,000.00	II	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	7,677,000.00	
A	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				7,500,000.00	A	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	7,677,000.00	
03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	7,500,000.00	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	7,677,000.00	
III	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				7,500,000.00	III	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	10,000,000.00	
A	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral bukan				7,500.000.00	A	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara,	10,000.000.00	



NO	RANCANGAN AWAL RPJMD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
	Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat						Mineral bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat		
04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1 Laporan	7,500,000.00	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	10,000,000.00	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN				7,500,000.00	IV	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	7,677,000.00	
A	Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi				7,500,000.00	A	Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	7,677,000.00	
02	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (Kapasitas terpasang investasi) di Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (Kapasitas terpasang investasi) di Daerah	1 Laporan	7,500,000.00	02	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (Kapasitas terpasang investasi) di Daerah	7,677,000.00	
V	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				7,500,000.00	V	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	7,617,000.00	
A	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				7,500,000.00	A	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	7,617,000.00	
03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas dalam Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi	1 Laporan	7,500,000.00	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas dalam Daerah	7,617,000.00	



NO	RANCANGAN AWAL RPJMD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
			yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi						

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas, Dinas ESDM Provinsi NTB berperan dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka mewujudkan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Kesejahteraan Masyarakat Nusa Tenggara Barat akan dijabarkan kedalam 5 (sasaran) yang terdiri dari :

1. Meningkatnya kontribusi sektor pertambangan terhadap laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang
2. Meningkatnya energi baru terbarukan dalam bauran energi
3. Meningkatnya peran energi baru terbarukan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca
4. Meningkatnya konsumsi listrik untuk produktifitas masyarakat
5. Pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 yang merupakan pelaksanaan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Yang Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru. Selain itu penyusunan Rencana Strategis ini juga telah memperhatikan :

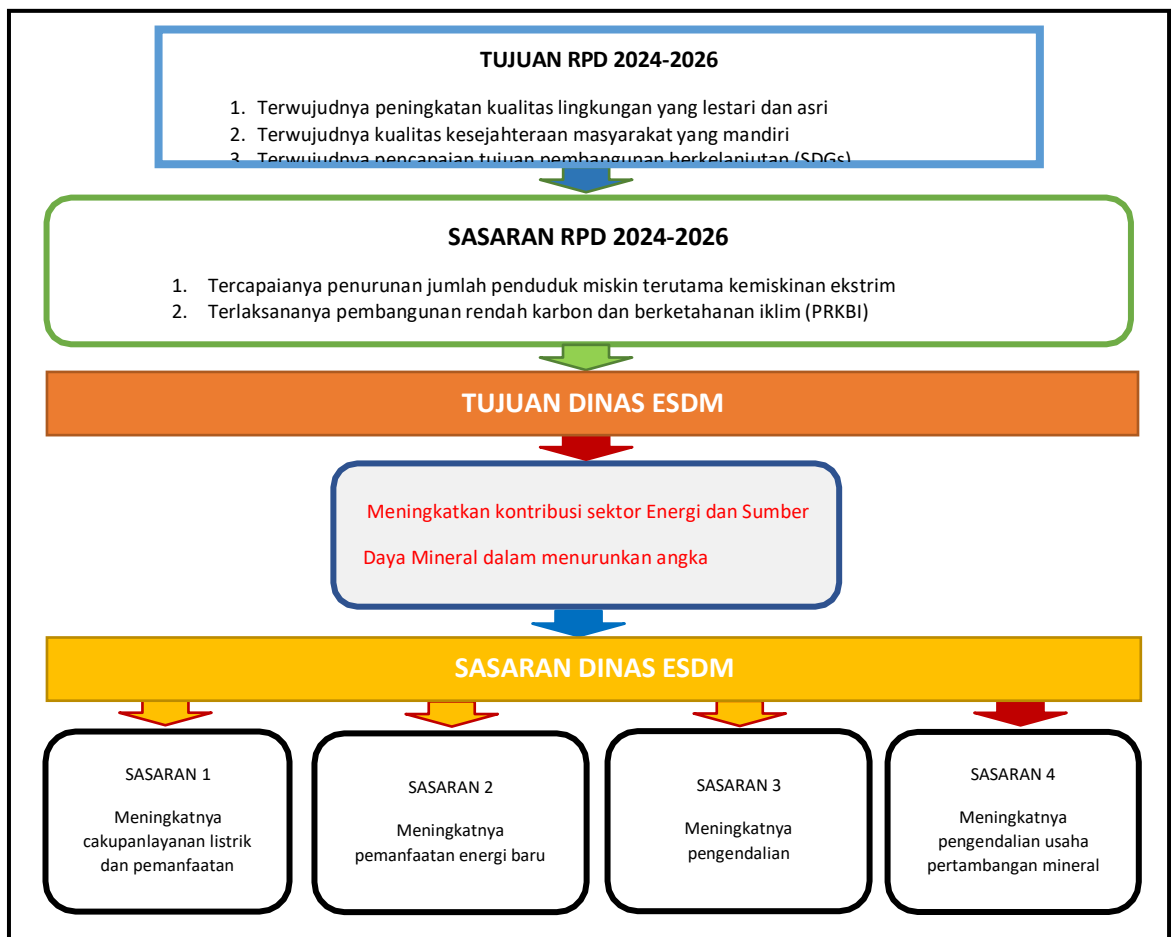
1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024
2. Kesesuaian sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2020-2025.
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD Tahun 2019-2023.
4. Isu-isu strategis yang berkembang baik skala Provinsi maupun skala Nasional.
5. Kebijakan Daerah maupun Kebijakan Nasional, dan
6. Perkembangan regulasi.

Terdapat perubahan yang signifikan terkait dengan penyesuaian kewenangan akibat terbitnya beberapa peraturan dan perundang-undangan diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang.
2. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. yang merupakan bagian dari turunan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 291.K/GL.01/MEM/.G/2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

Penyesuaian kewenangan tersebut terdiri dari sub urusan pemerintahan bidang geologi yang menarik kewenangan pemerintah provinsi terhadap Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin

pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi. Adapun penyesuaian berikutnya adalah terkait dengan kewenangan terhadap sub urusanbidang mineral dan batubara yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang mendelegasikan sebagian pemberian perizinan berusaha bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) serta Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Guna melaksanakan pendelegasian tersebut, Pemerintah Provinsi telah menyiapkan organisasi perangkat daerah serta program kegiatan untuk melaksanakannya. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2022.



Gambar 3.1 Tujuan dan Sasaran dalam mendukung Misi Pembangunan NTB dalam RPD 2024-2006

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Dinas ESDM sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral bertanggung jawab terhadap peningkatan pelayanan diantaranya :

1. Peningkatan cakupan layanan dasar listrik dan peningkatan konsumsi listrik untuk produktifitas masyarakat.
2. Peningkatan kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi melalui pemanfaatan potensi energi setempat.
3. Peningkatan peran sektor energi dalam penurunan emisi gas rumah kaca.
4. Pengendalian pemanfaatan air tanah.
5. Peningkatan kontribusi sektor pertambangan mineral dan batubara melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan dan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara.

Kelima pelayanan terkait dengan urusan ESDM tersebut akan menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ESDM. Selanjutnya akan diselaraskan antara keempat isu strategis diatas dengan faktor eksternal berupa sasaran jangka menengah Kementerian ESDM, implikasinya terhadap RTRW dan KLHS yang akan digambarkan dalam tabel 3.2 berikut :

No	GAMBARAN PELAYANAN	SASARAN JANGKA PMENENGAH K/L						SASARAN PROVINSI			IMPLIKASI RTRW	IMPLIKASI KLHS
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026		
1	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapatkan layanan listrik (%)	-	-	-	-	-	-	1,18	1,18	1,18	Rencana pengembangan pembangkit dan jaringan listrik termasuk dalam jaringan energi dan kelistrikan termasuk didalamnya pengembangan bagi daerahterpencil dan kepulauan	Adanya potensi kerusakan lingkungan akibat dari pengembangan pembangkit dan jaringan listrik termasuk pemanfaatan energi terbarukan dalam pengembangan pembangkit listrik
	Peningkatan konsumsi listrik masyarakat (Listrik perkapita)	1.084	1.089	1.123	1.173	1.336	1.408	801	826	857	Rencana pengembangan pembangkit dan jaringan listrik termasuk dalam jaringan energi dan kelistrikan termasuk didalamnya pengembangan bagi daerahterpencil dan kepulauan	Adanya potensi kerusakan lingkungan akibat dari pengembangan pembangkit dan jaringan listrik termasuk pemanfaatan energi terbarukan dalam pengembangan pembangkit listrik
2	Peningkatan kontribusi EBT dalam bauran energi (Persentase energi baru terbarukan dalam bauran energi)	-	13,40	14,50	15,70	17,90		20,99	22,86	25,00	Penyediaan ruang bagi pengembangan EBT.	
3	Pengendalian pemanfaatan air tanah (Persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan)	-	-	-	-	-	-	7,88	8,96	10,04	Zona konservasi daerah Cekungan Air Tanah	Degradasi daya dukung air tanah terkait dengan semakin meningkatnya pemanfaatan air tanah dan rusaknya daerah resapan air tanah
4	Pengendalian pertambangan mineral dan batubara (Persentase IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar)	-	-	-	-	-	-	9,50	10,06	11,17	wilayah pertambangan yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang	Terganggunya fungsi tata ruang akibat kegiatan pertambangan akan menurunkan daya dukung lingkungan akibat pembukaan lahan dan pencemaran air

Dari gambaran tabel 3.2 diatas didapat informasi mengenai isu strategis yang akanditangani dalam Renstra Dinas ESDM Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan cakupan layanan listrik dan konsumsi listrik;
2. Meningkatkan kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi;
3. Meingkatkan peran sektor energi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca;
4. Meningkatkan Konservasi dan pengendalian pemanfaatan air tanah;
5. Meningkatkan pengelolaan dan pengendalian kegiatan pertambangan mineral danbatubara.

Sebagai tambahan isu strategis yang terkait dengan lingkungan baik secara Nasional maupun Global adalah menjadikan Provinsi NTB Net Zero Emission pada tahun 2025. Beberapa hal yang mendasari dan NTB Net Zero Emission adalah sebagai berikut :

NTB Net Zero Emissions

Pemanasan bumi yang berlangsung secara masif dan terjadi di seluruh dunia dalam rentang waktu yang panjang telah membuat kehidupan di bumi terancam. Pemanasan tersebut dipicu oleh terbentuknya Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan dari emisi karbon hasil aktivitas manusia di berbagai sektor. Oleh karena itu, bangsa-bangsa bersepakat untuk menyusun strategi jangka panjang secara bersama-sama dalam upaya mencegah kenaikan suhu bumi yang lebih cepat dan menghambat kenaikan permukaan laut secara ekstrem. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Konferensi Para Pihak atau *Conference of Parties* (CoP) yang kemudian menghasilkan Kesepakatan Paris atau *Paris Agreement*.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memproyeksikan terwujudnya kondisi *Climate Neutral* pada tahun 2060, yang ditandai dengan berkurangnya secara signifikan jumlah karbon yang dihasilkan dari berbagai macam aktivitas manusia di berbagai sektor seperti kehutanan, pertanian, limbah, proses industri dan energi –termasuk transportasi di dalamnya. Pada tahun 2021, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat telah menyampaikan pada forum COP 26 di Glasgow, Inggris, bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat bertekad untuk mencapai kondisi *Net Zero Emissions* pada tahun 2050, atau lebih cepat 10 (sepuluh) tahun dari target nasional, di tahun 2060.

Dimana kondisi *Net Zero Emissions* di Provinsi Nusa Tenggara Barat akan terwujud dengan menempuh 3 (tiga) strategi yaitu :

1. Pengembangan energi baru terbarukan (EBT);
2. *Zero waste*;
3. NTB Hijau.

Energi kelistrikan menjadi salah satu sektor paling penting yang mendapatkan perhatian mengingat kontribusinya dalam pembentukan Gas Rumah Kaca. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sektor energi termasuk penghasil emisi GRK utama Bersama dengan sektor kehutanan dan sektor limbah.

Selain mendorong penggunaan EBT dalam penyediaan listrik, juga dilakukan upaya pengalihan bahan bakar (*fuel switching*) dan pemanfaatan gas buang semaksimal mungkin. Pengalihan sumber-sumber energi primer pembangkit dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke gas pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) diikuti dengan pencampuran energi *biofuel* atau *biodiesel* pada pembangkit-pembangkit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Penyediaan tenaga listrik sampai dengan tahun 2029 memang masih akan didominasi oleh pembangkit berbahan bakar fosil terutama batu bara. Akan tetapi upaya untuk mengurangi pengoperasian pembangkit batu bara secara signifikan telah ditetapkan, termasuk pemanfaatan *coal based methane* (CBM) apabila keekonomiannya sudah memenuhi dan mampu bersaing dengan bahan bakar fosil konvensional. Selain itu, penggunaan teknologi hasil inovasi seperti *Integrated Gasification Combined Cycle* (IGCC) dan *Carbon Capture Utilization and Storage* (CCUS) untuk mengurangi emisi GRK secara signifikan, juga dimasukkan sebagai bagian dari komitmen dan target Pemerintah mengurangi emisi GRK selama proses transisi dari energi berbasis fosil menuju energi bersih.



Selain itu, dalam proses transisi Pemerintah juga berkomitmen memanfaatkan lebih banyak bahan bakar berbasis biomasa untuk digunakan secara bersama (*Co-Firing*) dengan batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) *existing* dan yang sudah direncanakan atau terkontrak untuk dibangun untuk memenuhi kebutuhan energi listrik.

Energi Baru merupakan sumber energi yang berasal dari sumber-sumber energi hasil penemuan atau inovasi manusia yang belum pernah digunakan sebelumnya, baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (*coal bed methane*), batu bara tercairkan (*liquified coal*) dan batu bara tergaskan (*gasified coal*). Selain itu, sumber-sumber EBT yang dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik antara lain adalah biomassa, *biofuel*, biogas dan energi laut, *Ocean Thermal Energy Conversion* (OTEC), bio CNG, dan *fuel cell*/Hidrogen.

Pengembangan EBT dalam periode transisi hingga 10 tahun ke depan dilakukan secara intensif dengan tetap menjaga keseimbangan *supply and demand*. Inisiatif strategis juga diperlukan dalam rangka menjamin kecukupan pasokan dan meningkatkan bauran energi dari pembangkit Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di masa depan dengan harga energi listrik dari pembangkit EBT yang semakin optimal.

Inisiatif strategis peningkatan bauran dan pemanfaatan EBT sebagai pasokan pembangkit tenaga listrik dilakukan antara lain dengan: pengembangan pembangkit EBT dengan tetap memperhatikan :

1. Keseimbangan *supply-demand*;
2. Kesiapan sistem tenaga listrik dan keekonomian;
3. Pemanfaatan sumber energi terbarukan baik dari jenis energi aliran dan terjunan air, energi panas bumi (termasuk skala kecil/modular), *biofuel*, energi angin, energi sinar matahari, biomassa, sampah dan lain-lain;
4. Pengembangan *microgrid* dengan menerapkan tersebar/terpusat PV, tenaga bayu, atau pico-hydro untuk daerahdaerah terisolir/komunitas terpencil yang jauh dari jaringan PLN pada daerah tertinggal, dan pulau-pulau terluar lainnya sesuai dengan potensi energi yang tersedia;
5. Pengembangan PLTS di lahan bekas tambang yang sudah tidak beroperasi;
6. Pemanfaatan waduk-waduk untuk PLTS Terapung sehingga dapat menurunkan biaya pembebasan lahan dengan tetap mempertimbangkan kajian operasi dan pemeliharaannya;
7. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) *hybrid* dengan PLTD untuk daerahdengan jam nyala rendah (di bawah 12 jam/hari).

Inovasi Pengembangan EBT

Dibandingkan dengan pembangkit berbasis fosil pada umumnya, secara ekonomi pembangkit-pembangkit bersumber EBT belum dapat berkompetisi secara *head to head*. Meskipun demikian, pengembangan teknologi dan inovasi di bidang penyediaan sumber energi bersih sudah sangat maju, apalagi bilamana dilihat dari harga keekonomian pada 10 atau 20 tahun yang lalu.

Pembangkit hidrogen juga menjadi opsi yang dapat diandalkan sekaligus aman, seiring perkembangan dan inovasi teknologi yang tersedia. Akan dibuat ekosistem bisnis yang memungkinkan *hydrogen economy* dapat bekerja, dengan *streamlining* produksi hidrogen maupun pemanfaatan hidrogen untuk *large scale power plant*.

Inovasi pengembangan EBT juga dilakukan tidak hanya berbasis sumber energinya, tetapi juga dalam pengelolaannya sampai di tingkat konsumen listrik. Elektrifikasi sektor transportasi berbasis



BBM baik bus, truk, mobil penumpang pribadi maupun motor listrik untuk mewujudkan *green to green concept*. Dengan demikian, akan terbangun ekosistem di mana “*Green power plant powering green car and houses.*”. *Milestones* (Tonggak) Penting

Kemudian untuk lebih operasionalnya tujuan dan sasaran dinas dibuatlah *Cascading Renstra* Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024-2026 sebagaimana disajikan pada gambar dibawah ini :

OPD	Tujuan 1. Meningkatkan kontribusi sektor energi dan sumber daya mineral dalam menurunkan angka kemiskinan, pembangunan rendah karbon dan net zero emission			
	Indikator Kinerja : 1. Kontribusi sektor tambang dalam laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang 2. Implementasi pembangunan rendah karbon sektor energi 3. Bauran energi baru terbarukan			
Kepala OPD	Sasaran 1. Meningkatnya cakupan layanan listrik dan pemanfaatan energi listrik oleh masyarakat	Sasaran 2. Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	Sasaran 3. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Sasaran 4. Meningkatnya kontribusi sektor tambang dalam pertumbuhan ekonomi
	Indikator Kinerja : Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapatkan layanan listrik (%)	Indikator Kinerja : Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	Indikator Kinerja : Persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan (%)	Indikator Kinerja : Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar (<i>good mining practice</i>) (%)
Eselon III	Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan	Program : Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Program : Pengelolaan Aspek Kegeologian	Program : Pengelolaan Mineral dan Batubara
	Sasaran Program : Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Sasaran Program : Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan pada pembangkit listrik	Sasaran Program : Meningkatkan pengendalian pemanfaatan air tanah	Sasaran Program : Meningkatkan pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara
	Indikator Kinerja : Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan (Jiwa)	Indikator Kinerja : Prosentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik(%)	Indikator Kinerja : Persentase izin pemanfaatan air tanah yang dikendalikan.	Indikator Kinerja : Persentase izin usaha pertambangan yang dikendalikan.
Pelaksana	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN

Gambar 3.4 Coascading Renstra Dinas ESDM NTB Tahun 2024-2026

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Provinsi NTB, maka kebijakan yang terkait dalam Program Prioritas Daerah yang terkait dengan :

1. Pengentaaan kemiskinan melalui peningkatan pelayanan dasar listrik bagi penduduk miskin;
2. Pengentaaan kemiskinan melalui peningkatan pelayanan dasar air bersih bagi penduduk miskin;
3. Peningkatan pemanfaatan EBT dan pemenuhan kebutuhan energi .

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Adapun Tujuan dan sasaran rencana kerja dirumuskan berdasarkan isu-isu penting yang sudah rencana kerja untuk tahun 2024 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan kontribusi sektor energi dan sumber daya mineral dalam menurunkan angka kemiskinan, pembangunan rendah karbon dan <i>net zero emission</i>	Persentase kontribusi sektor energi dan sumber daya mineral terhadap PDRB	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dan pemanfaatan energi listrik oleh masyarakat	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapatkan layanan listrik (%)	1,18	1,18	1,18
			Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	22,72	23,86	25,00



			Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan	100	100	100
			Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (<i>good mining practices</i>)	9,50	10,06	11,17

Pada tahun 2024 yang akan datang terdapat satu tujuan Rencana Kerja yang akan dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Meningkatkan kontribusi sektor energi dan sumber daya mineral dalam menurunkan angka kemiskinan pembangunan rendah karbon dan *net zero emission* dengan tiga indikator yaitu Kontribusi Sektor Tambang dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Tambang (%), Implementasi pembangunan rendah karbon sektor energi, dan bauran energi baru terbarukan. Terdapat enam sasaran Dinas ESDM Tahun 2024-2026 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan indikator Persentase rumah tangga pengguna listrik (%). Indikator tersebut dihitung dari jumlah rumah tangga yang telah menikmati listrik terhadap jumlah keseluruhan rumah tangga dikalikan 100 %. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 digunakan istilah persentase rumah tangga pengguna listrik yang dihitung dengan formulasi perbandingan jumlah rumah tangga pengguna listrik terhadap jumlah keseluruhan rumah tangga dikalikan 100 %.
2. Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan indikator Persentase pemenuhan akses listrik bagi rumah tangga miskin ekstrim yaitu jumlah rumah tangga dengan katagori miskin ekstrim yang mendapatkan layanan listrik PLN dibagi jumlah seluruh rumah tangga miskin ekstrim yang belum memiliki akses listrik dikalikan 100%. Kategori miskin ekstrim adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok desil 1-3 sesuai dengan basis data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
3. Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan indikator Konsumsi listrik perkapita (kWh/kapita) yaitu meningkatnya konsumsi listrik masyarakat/industri untuk kepentingan produktif dengan mendorong pemanfaatan listrik PT. PLN, Penyediaan Listrik Untuk Kepentingan Sendiri serta meningkatkan pelayanan badan usaha yang bekerja di sektor ketenagalistrikan. Konsumsi Listrik perkapita (kWh/Kapita) adalah Jumlah kWh(*kilo Watt hours*) energi listrik yang digunakan atau dimanfaatkan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun.
4. Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dengan indikator persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%). Indikator tersebut dihitung melalui formulasi rasio jumlah penggunaan sumber energi baru terbarukan terhadap jumlah total konsumsi energi di daerah dikali 100 %. Berdasarkan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah Provinsi 2015-2050 target kontribusi energi baru terbarukan sebesar 22,72% pada tahun 2024, selanjutnya 23,86% pada tahun 2025 dan diharapkan akan meningkat sebesar 25,00% pada tahun 2026.
5. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan indikator Persentase pemanfaatan air tanah di kab/kota Provinsi NTB yang berkelanjutan. Indikator tersebut dihitung menggunakan formulasi Jumlah Kab/Kota di NTB dengan pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan dibagi total jumlah Kab/Kota dikali 100 %.



6. Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan indikator Persentase jumlah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik (*good mining practice*). Indikator tersebut dihitung dengan menggunakan formula jumlah izin usaha pertambangan yang melaksanakan *good mining practice* dibagi total jumlah izin usaha pertambangan yang ada dikali 100 %.

3.3 Program dan Kegiatan

Guna mendukung tujuan dan sasaran Renstra sebagai jabaran dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024-2026, maka melalui Rencana Kerja Tahun 2024 yang akan datang akan melaksanakan 5 Program dengan 21 Kegiatan dan 78 Sub Kegiatan dengan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2024 mengalami perubahan yang sangat signifikan, jika sebelumnya menggunakan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan Program dan kegiatan berjumlah 11 program dan 41 kegiatan.

Untuk itu pada tahun 2024 akan dilaksanakan lima program yang terdiri dari satu program penunjang dan empat program prioritas yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran, melalui peningkatan kualitas administrasi dan ketatalaksanaan serta penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan rencana anggaran sebesar Rp. 9.546.880.218,- Kegiatan-kegiatan dari program ini adalah :
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 7 (tujuh) sub kegiatan;
 - b. Administrasi Keuangan dengan 5 (lima) sub kegiatan;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan 4 (empat) sub kegiatan;
 - d. Administrasi Kepegawaian dengan Perangkat Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan;
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 7 (tujuh) sub kegiatan;
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan;
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 (tiga) sub Kegiatan;
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 6 (enam) sub kegiatan.
2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.
Program pengelolaan aspek kegeologian bertujuan untuk mewujudkan konservasi air tanah melalui pengendalian pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah, penetapan nilai perolehan air tanah dan pembangunan 20 unit sumur bor dalam melalui 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - a. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi dengan 2 (dua) sub kegiatan;
 - b. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi dengan 3 (tiga) sub kegiatan.
3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.
Program pengelolaan mineral dan batubara bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan perusahaan pertambangan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 135.000.000,- yang digunakan untuk membiayai 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - a. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang



Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut dengan 2 (dua) sub kegiatan;

- b. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut dengan 3 (tiga) sub kegiatan; dan
- c. Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan 1(satu) sub kegiatan.

4. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

Program pengelolaan energi terbarukan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan energi yang berkelanjutan dengan sasaran untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi dengan target bauran energi pada tahun 2024 sebesar **20,1%**. Rencana anggaran untuk program ini sebesar Rp. 282.376.000,- untuk membiayai pembangunan digeter biogas dan rehabilitasi PLTMH dan PLTS Komunal, sosialisasi dan pembinaan pengawasan usaha energi melalui 5 (lima) kegiatan dengan yaitu:

- a. Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun dengan 2(dua) sub kegiatan;
- b. Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi dengan 3 (tiga) sub kegiatan;
- c. Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi dengan 1(satu) sub kegiatan;
- d. Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi dengan 2 (dua) sub kegiatan;
- e. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi dengan 1(satu) sub Kegiatan.

5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program ini bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat dengan rencana anggaran sebesar Rp. 230.000.000,- yang akan digunakan untuk membiayai penyambungan listrik murah dan hemat bagi 75 Rumah Tangga Sasaran, pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan serta pelayanan perizinan di bidang ketenagalistrikan melalui tga kegiatan yaitu :

- a. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi dengan 2 (dua) sub kegiatan;
- b. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi dengan 1(satu) sub kegiatan; dan
- c. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan dengan 2 (dua) sub kegiatan.

Uraian lebih lengkap mengenai rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun



Tabel 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						10.294.256.218,00							11.288.435.462,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						10.294.256.218,00							11.288.435.462,00	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						10.294.256.218,00							11.288.435.462,00	
1.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	-			81 Angka	9.546.880.218,00						-	10.466.321.862,00	
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	-			9 Dokumen	373.000.000,00			-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	-	410.300.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	123.000.000,00	- Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran		135.300.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	- Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran		16.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	- Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran		22.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	- Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran		22.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	- Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran		22.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	- Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran		27.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	150.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran		165.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.161.222.098,00			-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-	-	8.973.186.270,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/ Bulan	8.097.142.098,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		8.906.856.270,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	41.580.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		41.580.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		2.750.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	13.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		14.300.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		7.700.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	18.000.000,00			-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-	-	19.800.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		2.750.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		2.750.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		11.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		3.300.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	3.500.000,00			-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-	-	3.850.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	2.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		2.200.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		1.650.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	123.070.000,00			-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-	-	135.461.780,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	2.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		2.750.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	2.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		2.750.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	4.320.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		4.836.780,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	3.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		3.300.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	3.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		3.850.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	7.250.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		7.975.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		110.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	63.821.120,00			-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-	-	70.203.232,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	8.821.120,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		9.703.232,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	55.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		60.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	508.768.000,00			-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-	-	528.471.680,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1800 Laporan	2.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		2.750.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	159.900.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		175.890.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				11 Laporan	346.368.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		349.831.680,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	295.499.000,00			-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-	-	325.048.900,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				8 Unit	51.670.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		56.837.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	110.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		121.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				22 Unit	14.100.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		15.510.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	49.729.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		54.701.900,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	30.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		33.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		44.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	-	-			-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-			-	45.000.000,00			-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-	-	49.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Dokumen	30.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		33.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	15.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		16.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-			-	55.000.000,00			-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-	-	60.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul				5 Dokumen	15.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		16.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				5 Laporan	15.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		16.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				5 Laporan	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		27.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-			-	135.000.000,00						-	148.500.000,00	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-			-	45.000.000,00			-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-	-	49.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				10 Dokumen	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		22.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				10 Laporan	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		27.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	-	-			-	70.000.000,00			-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-	-	77.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat				1 Laporan	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		27.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				5 Dokumen	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		22.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				1 Laporan	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		27.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-			-	20.000.000,00			-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-	-	22.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam				10 Laporan	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		22.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-	-			-	282.376.000,00						-	310.613.600,00	
	3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	-	-			-	20.000.000,00			-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-	-	22.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.03.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun				1 Dokumen	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		11.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun				1 Laporan	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		11.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	-	-			-	142.376.000,00			-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-	-	156.613.600,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa														
			jumlah dokumen data potensi biomassa				1 Dokumen	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		22.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas														
			Jumlah dokumen data potensi biogas				1 Dokumen	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		22.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas														
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas				5 Laporan	102.376.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		112.613.600,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	-	-			-	50.000.000,00			-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-	-	55.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.05.1.06.0003	Pemeliharaan infrastruktur biomassa dan/atau biogas														
			<i>Jumlah unit infrastruktur biomassa dan/atau biogas yang dipelihara</i>				10 Unit	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		55.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-	-			-	50.000.000,00			-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-	-	55.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah														
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah</i>				1 Laporan	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		27.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah														
			<i>Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		27.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	-	-			-	20.000.000,00			-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-	-	22.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10.0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat														
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat</i>				1 laporan	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		22.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
5.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-	-			-	230.000.000,00						-	253.000.000,00	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	-	-			-	40.000.000,00			-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-	-	44.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				1 Dokumen	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		22.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		22.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-	-			-	20.000.000,00			-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-	-	22.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		22.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-			-	170.000.000,00			-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-	-	187.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu														
			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		27.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				75 Unit	145.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		159.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA						289.992.000,00							318.991.200,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						289.992.000,00							318.991.200,00	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						289.992.000,00							318.991.200,00	
1.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	259.992.000,00						-	285.991.200,00	
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	21.000.000,00			-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-	-	23.100.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	- Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		2.200.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	- Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		2.200.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		2.200.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		16.500.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	217.182.000,00			-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-	-	238.900.200,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		1.650.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	26.754.000,00	- Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)	-		29.429.400,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				6 Laporan	188.928.000,00	- Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		207.820.800,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	21.810.000,00			-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-	-	23.991.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				2 Unit	21.810.000,00	- Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		23.991.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
2.	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	-	-			-	7.500.000,00						-	8.250.000,00	
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-			-	7.500.000,00			-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-	-	8.250.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>				1 Laporan	7.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		8.250.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
3.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-			-	7.500.000,00						-	8.250.000,00	
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	-	-			-	7.500.000,00			-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-	-	8.250.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.03.1.04.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				1 Laporan	7.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		8.250.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
4.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-	-			-	7.500.000,00						-	8.250.000,00	
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-	-			-	7.500.000,00			-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-	-	8.250.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah														
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah				1 Laporan	7.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		8.250.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
5.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-	-			-	7.500.000,00						-	8.250.000,00	
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-	-			-	7.500.000,00			-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-	-	8.250.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	7.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Keseja hteraan (PD-4)	-		8.250.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	J U M L A H							10.584.248.218,00							11.607.426.662,00	



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memfokuskan pada Penguatan Program Industrialisasi dan Transformasi Ekonomi pada Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) NTB Tahun 2024.

RKPD Tahun 2024 mengambil Tema “ Peningkatan Produktivitas Daerah untuk mempercepat Transformasi Ekonomi melalui Sumber Daya Manusia dalam lingkungan yang berkualitas.

Strategi dan arah kebijakan Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada startegi dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nudsa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 dalam mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah. Dinas ESDM Provinsi NTB mengemban tugas untuk melaksanakan tujuan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 yang terdiri dari :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri
2. Terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang mandiri
3. Terwujudnya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)

Adapun sasaran dalam Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 yang sejalan dengan tujuan diatas terdiri dari :

1. Tercapainya penurunan jumlah penduduk miskin terutama kemiskinan ekstrim
2. Terlaksananya pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim (PRKBI)
3. Tercapainya Net Zero Emosion

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026 diperlukan beberapa strategi dan arah kebijakan untuk menjawab isu strategi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mellaui rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas ESDM Provinsi NTB sebagai berikut :

a. Sasaran :

1. Bidang Kelistrikan yaitu Meningkatkan cakupan layanan listrik dan Pemanfaatan energi listrik bagi masyarakat
2. Bidang Energi Baru Terbarukan yaitu Meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan
3. Bidang Geologi dan Air Tanah yaitu Meningkatkan Pemanfaatan Air Tanah
4. Bidang Mineral dan Batubara yaitu Meningkatkan Pengendalian usaha pertambangan Mineral dan Batubara

b. Strategi

1. Bidang Kelistrikan
 - ✓ Peningkatan kapasitas pembangkit dan jaringan listrik hingga kearah terpencil
 - ✓ Peningkatan akses listrik bagi masyarakat miskin
 - ✓ Peningkatan konsumsi listrik masyarakat untuk kepentingan produksi
2. Bidang Energi Baru Terbarukan
 - ✓ Meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan dengan menggunakan potensi energi setempat
3. Bidang Geologi dan Air Tanah
 - ✓ Meningkatkan konservasi pemanfaatan air tanah



4. Bidang Mineral dan Batubara

- ✓ Meningkatkan pelaksanaan praktek pertambangan yang baik dan benar (Good Morning Practise)

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas ESDM berkontribusi terhadap arah kebijakan nomor 1 Pemenuhan Kebutuhan Energi serta Mitigasi Bencana, Pemerataan Infrastruktur dan konektivitas wilayah dan nomor 2 Penanggulangan kemiskinan yaitu melalui pemenuhan infrastruktur dasar air bersih, energi dan listrik. Sedangkan untuk arah kebijakan nomor 4 Pelestarian Lingkungan Hidup, Ketahanan Pangan dan Energi Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan. Untuk itu pada tahun 2024, Dinas ESDM Provinsi NTB melalui Kantor Induk dan Kantor Cabang Wilayah Pulau Sumbawa akan melaksanakan 10 program dan 26 kegiatan, 65 sub kegiatan, yang seluruhnya dibiayai melalui Anggaran Belanja Operasional dan Belanja Pegawai, dengan total anggaran sebesar Rp. 11.365.882.199,00.

A. Induk Rp. 11.069.932.039

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 10.422.572.389,-
2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp. 87.874.450,-
3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp. 133.961.575,-
4. Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp. 200.527.925,-
5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp. 224.995.700,-

B. Induk Rp. 295.950.160,-

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 262.979.160,-
2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp. 7.677.000,-
3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp. 10.000.000,-
4. Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp. 7.677.000,-
5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp. 7.617.000,-

Lokasi pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berada di semua Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ada yang berlokasi di luar daerah, yaitu kegiatan dalam bentuk koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Rencana Kerja Tahun 2024 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang kemudian akan ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sebagai dasar pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di lingkungan Dinas ESDM Provinsi NTB. Selain itu, untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, maka tiap-tiap aparatur bertanggungjawab dalam mencapai target-target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja serta mempedomani Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan, untuk selanjutnya setiap unit Eselon II, Eselon III dan Eselon agar menyusun Rencana Aksi sesuai dengan DPA dengan mempertimbangkan waktu sesuai dengan skala prioritas dan rencana anggaran kas yang ditetapkan.

Beberapa program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas ESDM tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyambungan listrik murah dan hemat bagi 75 Rumah Tangga Sasaran yang diutamakan pada daerah-daerah arahan penanggulangan kemiskinan.
2. Pemberian rekomendasi, Pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Ketenagalistrikan serta usaha di bidang Energi.
3. Program Nusa Terang Benderang
 - ✓ Pembangunan PLTS *on grid* 2x5 MWp di Sumbawa dan Bima.
 - ✓ Beroperasinya PLTMH *on grid* Pandan Duri 580 kW hibah dari Pemerintah Inggris.
 - ✓ Konstruksi pabrik Bio CNG dengan kapasitas 10 ton per hari.
 - ✓ Pelaksanaan *Feasibility Study* PLT Biomassa hibah dari Pemerintah Denmark.



- ✓ Pelaksanaan program listrik murah (APBD, Pokir dan BPBL).
 - ✓ Penyusunan Pergub NTB *Energy Masterplan* .
4. Industri Pertambangan dan Smelter
 5. Pemuktahiran Pergub Nilai Perolehan Pajak Air Tanah



Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Perangkat Daerah Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas ESDM Provinsi NTB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Target Capaian Kinerja					
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									11.365.882.199		
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									10.422.572.389		
3	29	01	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									238.583.200		
3	29	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	1 Dokumen	73.51 Nlai	102.829.010	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
3	29	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	Dokumen RKA-SKPD	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	1 Dokumen	73.51 Nlai	10.371.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
3	29	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	1 Dokumen	73.51 Nlai	12.229.400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		
3	29	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Nilai SAKIP OPD	Dokumen DPA-SKPD	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	1 Dokumen	73.51 Nlai	11.171.950	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
3	29	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	1 Dokumen	73.51 Nlai	11.934.720	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
3	29	01	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	Dokumen LAKJP	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	1 Dokumen	73.51 Nlai	11.545.320	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
3	29	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Dokumen monitoring, evaluasi dan Alporan Tahunan	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	2 Dokumen	73.51 Nlai	78.401.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
3	29	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									8.878.066.979		
3	29	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		78 Orang		8.815.592.461	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
3	29	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen administrasi pelaksanaan ASN	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		36.060.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
3	29	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		3.459.060	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
3	29	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Laporan	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		15.535.206	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
3	29	01	1,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		7.420.250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
3	29	01	1,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									8.182.400		
3	29	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		2.462.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022/3					Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
3	29	01	1,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		2.356.300	
3	29	01	1,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		1.129.300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	29	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Dokumen	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		2.234.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	29	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								3.739.560	
3	29	01	1,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Laporan	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		2.040.040	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	29	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		1.699.520	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	29	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								221.395.360	
3	29	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	Jumlah sarana dan Prasarana disiplin pegawai	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	12 Jenis	73.51 Nilai	2.173.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	29	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	5 Jenis	73.51 Nilai	22.800.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	29	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	Jumlah bahan logistik kantor	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	6 Jenis	73.51 Nilai	4.320.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	29	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	Jumlah bahan cetakan	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	10 Jenis	73.51 Nilai	4.111.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	29	01	1,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	Jumlah bahan matrial	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	20 Jenis	73.51 Nilai	5.490.560	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	29	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	Jumlah tamu	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	1200 Orang	73.51 Nilai	7.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	29	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	1 Tahun	73.51 Nilai	175.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	29	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								8.000.000	
3	29	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	Jumlah peralatan mesin lainnya	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	6 Unit	73.51 Nilai	8.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	29	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								621.739.890	
3	29	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	Jumlah surat	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	2500 Surat	73.51 Nilai	155.303.490	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	29	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Rekening	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	3 Rekening	73.51 Nilai	97.940.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	29	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	Jumlah pelayanan jasa	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua	BB Nilai	8 Orang	73.51 Nilai	368.496.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022/3					Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Target Capaian Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
									Kecamatan, Semua Kelurahan						
3	29	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								442.865.000		
3	29	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	Julah kendaraan yang dipelihara	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	7 Unit	73.51 Nilai	51.670.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
3	29	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	8 Unit	73.51 Nilai	110.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
3	29	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	Jumlah peralatan yang di pelihara	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	30 Unit	73.51 Nilai	9.880.000		
3	29	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	Jumlah gedung yang dipelihara	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	1 Unit	73.51 Nilai	271.315.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN								784.681.658		
3	29	02	1,01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								36.987.600		
3	29	02	1,01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah data Zona Konservasi Air Tanah		Terkendalnya pemanfaatan air tanah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 dokumen		36.987.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
3	29	02	1,03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								50.876.850		
3	29	02	1,03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	Jumlah data NPA	Terkendalnya pemanfaatan air tanah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 zona	3 Dokumen	50 izin	20.876.850	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
3	29	02	1,03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	Jumlah pemanfaatan NPA	Terkendalnya pemanfaatan air tanah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 zona	1 Laporan	50 izin	30.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA								133.961.575		
3	29	03	1,03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut								93.999.975		
3	29	03	1,03	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	Meningkatnya pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan benar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Rekomendasi	50 Izin	37.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
3	29	03	1,03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi	Meningkatnya pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan benar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 Izin		56.999.975	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
3	29	03	1,04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat								29.971.200		
3	29	03	1,04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat		Jumlah laporan koordinasi	Meningkatnya pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan benar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Dokumen		9.990.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022/3				Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		
3	29	03	1,04	03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat		Jumlah laporan koordinasi	Meningkatnya pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan benar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Dokumen		9.990.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
3	29	03	1,04	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat		Jumlah IPR yang dikendalikan	Meningkatnya pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan benar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 IPR		9.990.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
3	29	03	1,07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan								9.990.400		
3	29	03	1,07	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	Meningkatnya pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan benar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		9.990.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN								200.527.925		
3	29	05	1,03		Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun								19.495.375		
3	29	05	1,03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun		Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	Persentase energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Rekomendasi		10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
3	29	05	1,03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun		Jumlah Laporan	Persentase energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Izin		9.495.375	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
3	29	05	1,05		Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan atau Biogas dalam Wilayah Provinsi								20.175.200		
3	29	05	1,05	06	Penyusunan dan Pemuktahiran data potensi biogas		Jumlah Laporan	Persentase energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		20.175.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
3	29	05	1,07		Pengelolaan Aneka Energi Baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, Gerakan								139.968.650		
3	29	05	1,07	02	Pembinaan dan Pengawasan aneka EBT (Kapasitas terpasang investasi) di daerah		Jumlah Laporan	Persentase energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		124.968.650	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
3	29	05	1,07	10	Penyusunan dan Pemuktahiran Data Potensi aneka EBT di Daerah		Jumlah Laporan	Persentase energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		1 Dokumen		15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
3	29	05	1,10		Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan ditingkat daerah Provinsi								20.888.700		
3	29	05	1,10	03	Sosialisasi Konversi Energi kepada Masyarakat		Jumlah Laporan	Persentase energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		1 Dokumen		20.888.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								224.995.700		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022/3					Catatan Penting			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
3	29	06	1,01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi								43.745.700				
3	29	06	1,01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	Persentase rumah tangga berlistrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32 Rekomendasi		22.236.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			
3	29	06	1,01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi	Persentase rumah tangga berlistrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 Izin		21.609.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			
3	29	06	1,06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan								181.250.000				
3	29	06	1,06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		Jumlah SK penerima listrik murah dan hemat	Persentase rumah tangga berlistrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		30.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			
3	29	06	1,06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang dibangun	Persentase rumah tangga berlistrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75 RTS		151.250.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			
TOTAL													11.069.932.039				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	29				CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										295.950.160		
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										262.979.160		
3	29	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										21.067.160		
3	29	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	2 Jenis	73.51 Nilai	2.008.460	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			
3	29	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	jumlah barang yang dicetak	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	5 Jenis	73.51 Nilai	2.033.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			
3	29	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	Jumlah tamu	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	95 Orang	73.51 Nilai	2.025.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			
3	29	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	1 Tahun	73.51 Nilai	15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			
3	29	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								216.882.000				
3	29	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	Jumlah surat	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	300 Buah	73.51 Nilai	1.506.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			
3	29	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Rekening	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	3 Buah	73.51 Nilai	26.160.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			
3	29	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Jasa	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	5 Orang	73.51 Nilai	189.216.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			
3	29	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								25.030.000				
3	29	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Nilai SAKIP OPD	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kab. Sumbawa, Semua	BB Nilai	2 Unit	73.51 Nilai	21.810.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022/3					Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Kecamatan, Semua Kelurahan					
3	29	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Peralatan yang dipelihara	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Nilai	2 Unit	73.51 Nilai	3.230.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN								32.971.000	
3	29	02	1,03		Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								7.677.000	
3	29	02	1,03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah		Jumlah zona konservasi yang diawasi dan dikendalikan	Terkendalnya pemanfaatan air tanah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 Izin		7.677.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA								10.000.000	
3	29	03	1,04		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut								10.000.000	
3	29	03	1,04	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi (izin)	Meningkatnya pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan benar	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19 Izin		10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN								7.677.000	
3	29	05	1,07		Peengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan berupa Sinar Matahari Angin, Aliran dan Terjunan Air, Gerakan dan Pergerakan Suhu Lapisan Laut dalam Wilayah Provinsi								7.677.000	
3	29	05	1,07	02	Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di Daerah		Jumlah Dokumen	Meningkatnya penggunaan sarana EBT	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		7.677.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								7.617.000	
3	29	06	1,02		Penatausahaan Izin Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi								7.617.000	
3	29	06	1,02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi (izin)	Persentase rumah tangga berlistrik	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Izin		7.617.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
TOTAL													295.950.160	



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024 yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral tahun 2024 untuk mendukung pencapaian tujuan “Terwujudnya kualitas manusia yang kompetitif, unggul, andal dan taqwa, kualitas lingkungan yang lestari dan asri serta kesejahteraan masyarakat yang mandiri”. Dalam implementasinya nanti, Rencana Kerja Tahun 2024 akan dilaksanakan melalui optimalisasi terhadap seluruh sumber daya yang ada melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama baik secara internal maupun eksternal lintas stakeholder, serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Beberapa program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas ESDM tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyambungan listrik murah dan hemat bagi 75 Rumah Tangga Sasaran yang diutamakan pada daerah-daerah arahan penanggulangan kemiskinan.
2. Pemberian rekomendasi, Pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Ketenagalistrikan serta usaha di bidang Energi.
3. Program Nusa Terang Benderang
 - ✓ Pembangunan PLTS *on grid* 2x5 MWp di Sumbawa dan Bima.
 - ✓ Beroperasinya PLTMH *on grid* Pandan Duri 580 kW hibah dari Pemerintah Inggris.
 - ✓ Konstruksi pabrik Bio CNG dengan kapasitas 10 ton per hari.
 - ✓ Pelaksanaan *Feasibility Study* PLT Biomassa hibah dari Pemerintah Denmark.
 - ✓ Pelaksanaan program listrik murah (APBD, Pokir dan BPBL).
 - ✓ Penyusunan Pergub NTB *Energy Masterplan*.
4. Industri Pertambangan dan Smelter
5. Pemuktahiran Pergub Nilai Perolehan Pajak Air Tanah

Renja Tahun 2024 juga diharapkan dapat menjadi bagian dalam upaya peningkatan kinerja Dinas dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas. Pembangunan secara umum termasuk pembangunan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, tentunya memerlukan berbagai masukan, saran, dan kritik yang membangun dari seluruh *stakeholder* terkait. Hal ini dimaksudkan agar dapat dilakukan penyempurnaan terhadap perencanaan pembangunan di masa yang akan datang, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan dapat diwujudkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Akhirnya semoga segala yang direncanakan akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan geologi dan pertambangan yang berkelanjutan dan mewujudkan pengelolaan energi yang berkelanjutan.



Dinas ESDM Provinsi NTB



@DESDMNTB



@desdmntb



desdm@ntbprov.go.id



www.desdm.ntbprov.go.id